

PERKEMBANGAN DAN PELUANG KERJASAMA BILATERAL INDONESIA - BELANDA



DEPARTEMEN PERTANIAN



Bibliografi

PERKEMBANGAN DAN PELUANG KERJASAMA BILATERAL INDONESIA – BELANDA



DEPARTEMEN PERTANIAN RI

2001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dengan selesainya **Buku Perkembangan dan Peluang Kerjasama Bilateral Indonesia – Belanda**. Semoga buku ini bermanfaat dan dapat memberikan tambahan wawasan dalam membangun kerjasama secara bilateral dengan negara tersebut.

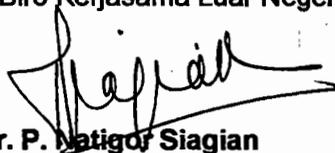
Buku kecil ini merupakan kumpulan informasi awal tentang kerjasama bilateral yang berisikan: keadaan umum negara Belanda, potensi sumberdaya alam dan pertanian yang dimiliki, perkembangan kerjasama bilateral dengan Indonesia dan peluang kerjasama yang perlu ditingkatkan pada masa yang akan datang. Buku ini merupakan salah satu judul dari 35 judul Buku Perkembangan dan Peluang Kerjasama Bilateral dan Regional yang disusun oleh Bagian Proyek Peningkatan Kerjasama Luar Negeri, Biro Kerjasama Luar Negeri Departemen Pertanian untuk tahun 2001.

Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih yang dalam atas kerja keras tim kecil yang telah menyusun 35 judul buku dalam waktu singkat diantara kesibukan tugas sehari-hari.

Kami menyadari keterbatasan data dan informasi yang didapat, analisis yang masih dangkal serta kemampuan membuat narasi dalam kurun waktu yang sangat terbatas. Untuk itu dengan rendah hati kami mengharapkan masukan dari pembaca guna penyempurnaan buku ini pada saat mendatang.

Mudah-mudahan buku ini dapat menjadi salah satu rujukan dalam menentukan langkah kerjasama bilateral dengan negara Belanda.

Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri



Ir. P. Yatigor Siagian



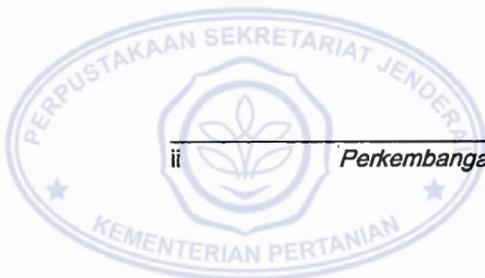
DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL	ii
TIM PENYUSUN	iii
I. KEADAAN UMUM	1
1.1. Sejarah Singkat	1
1.2. Politik dan Pemerintahan	3
1.3. Sosial Ekonomi	5
II. POTENSI NEGARA	9
2.1. Keadaan Geografis	9
2.2. Potensi Alam dan Pertanian	10
III. PERKEMBANGAN KERJASAMA	11
3.1. Kerjasama Bidang Politik	11
3.2. Kerjasama Bidang Ekonomi	16
3.3. Kerjasama Teknik	31
IV. PELUANG KERJASAMA	46
LAMPIRAN	50



DAFTAR TABEL

Nomor	Teks	Halaman
1.	Neraca Perdagangan antara Indonesia – Belanda (dalam jutaan US\$)	21
2.	Perkembangan Investasi Sektor Pertanian dan Industri Makanan Tahun 1996-2000 yang telah disetujui BKPM	49



TIM PENYUSUN

- Penasehat** : Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri
- Pengarah** : Kepala Bagian Kerjasama Bilateral
Kepala Bagian Kerjasama Regional
- Penanggung Jawab** : Ir. Metralinda Tunus, M.Sc./ Kepala Bagian
Kerjasama Multilateral
- Ketua Tim** : Ir. Iwan Ridwan, MM.
- Anggota** : Drs. Djoko Supono, MM.
Ir. Zulkifli Ali, M.Si.
Ade Chandradijaya, S.TP., M.Sc.
Henny Nurliani, S.Pi.
Budi Supriyono
Yayah Mardianah, SE.
Ir. Juariah
Budiarto
Nunik Ernawatingtyas
Abidan Rajaguguk
Ending



I. KEADAAN UMUM

1.1. Sejarah Singkat

a. Periode Kekuasaan Kerajaan Franka

Sebelum kedatangan bangsa Romawi dari Galelia, di Belanda sebelah utara tinggal suku Germania yang kemudian dikuasai bangsa Romawi pada abad pertengahan. Meskipun ada pemberontakan-pemberontakan seperti yang dipimpin Julius Givilis, kekuasaan Romawi tetap bertahan sampai berabad-abad lamanya. Menjelang abad ke-8 datang serbuan Germania yakni Saxen dan Frank dan pada tahun 800 Karel Agung menundukkan bangsa Fries sehingga seluruh daerah jatuh di bawah kekuasaan Kerajaan Frank.

b. Periode Kekuasaan Keluarga Bourgondia

Pada waktu terpecahnya Kerajaan Frank yang dipercepat oleh serbuan Bangsa Noor dan Deen, terbentuklah berbagai kekuasaan feodalistis yang tunduk kepada Jerman, Gelre, Urecht, Brabant, Friestland, Holland dan Zeeland. Abad ke-14 dan 15 orang-orang Bourgondia dan keturunannya, termasuk orang-orang Habsburg berhasil secara beruntun memasuki daerah-daerah Belanda Selatan dan Utara di bawah kekuasaannya.

c. Periode Republik

Tahun 1572 Willen van Oranye memimpin pemberontakan di daerah-daerah Holland dan Zeeland yang menyebabkan Kerajaan Bourgondia terpecah dua. Daerah utara mempersatukan diri dalam Uni dengan Utrecht dan dengan "Piagam Verlangtinge" (1581) menyatakan tidak tunduk kepada kekuasaan Kerajaan Bourgondia. Setelah perang 80 tahun (1568-



1648) muncul Republik Persatuan Nederlanden yang dipelopori gerakan militer Frederick Hendrik dan Maurits dengan mengkonsolidasikan daerah-daerah yang anti kekuasaan Bourgondia. Politik luar negeri ditentukan oleh kekuasaannya sebagai kekuatan perdagangan besar yang kemakmurannya bergantung pada perikanan, pelayaran dan monopoli perdagangan West Oost Indische Compagnie dan West Indische Compagnie. Pada tahun 1595 sebagai akibat revolusi, runtuhlah susunan pemerintah lama. Selama periode Napoleon, Belanda berada di bawah pemerintahan Prancis.

d. Periode Konstitusional

Pada tahun 1813 dibentuk kerajaan konstitusional, kemudian berturut-turut memerintah keluarga Oranye Nassau : Willem I(1815-1840), Willem II (1840-1849) dan Willem III (1849-1890). Pada waktu Willem III wafat, pewaris tahta Belanda adalah Wilhelmina yang naik tahta tahun 1890. Pada waktu Perang Dunia I (1914-1918), Belanda berhasil mempertahankan netralitasnya meskipun beberapa kali dilanggar oleh pihak-pihak yang berperang. Dalam Perang Dunia II Belanda diduduki tentara Jerman pada 15 Mei 1940, sehingga Wilhelmina harus mengungsi ke Inggris. Pada akhir Maret 1945, Overijssel, Drente Friesland, Groningen dan Gelderland dibebaskan tentara sekutu. Pada tanggal 5 Mei 1945 Jerman menyerah dan Belanda memperoleh kembali kemerdekaannya. Tahun 1948 Wilhelmina turun tahta dan digantikan oleh Juliana. Setelah Perang Dunia II berakhir, Belanda meninggalkan politik netralistisnya dan masuk menjadi anggota NATO. Dalam tahun 1958 Belanda, Belgia, dan Luxemburg membentuk Persatuan Benelux. Sebagai salah satu pendiri Masyarakat Ekonomi Eropa, Belanda mendukung integritas Eropa.



1.2. Politik dan Pemerintahan

a. Parlemen

Dewan Perwakilan Rakyat atau Parlemen terdiri dari dua kamar yaitu Tweede Kamer (Majelis Rendah) dan Eerste Kamer (Majelis Tinggi)

(1) Eerste Kamer (Majelis Tinggi)

Beranggotakan 75 orang yang dipilih untuk masa 6 tahun. Anggota Eerste Kamer dipilih oleh Dewan Daerah Propinsi (Provinciale Staten)

(2) Tweede Kamer (Majelis Rendah)

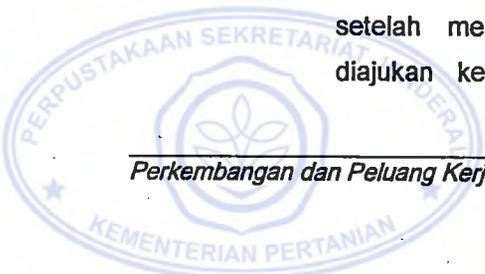
Beranggotakan 150 orang dipilih untuk masa 4 tahun. Sejak tahun 1917 berlaku sistem perwakilan berimbang (*evenredige vertegenwoordiging*), sehingga tercermin berbagai aliran politik dalam masyarakat. Pemilihan untuk anggota Tweede Kamer dilakukan secara langsung. Secara Politis pemilihan anggota Tweede Kamer lebih menentukan dari Eerste Kamer.

b. Sistem Pemerintahan

Belanda adalah negara berbentuk Kerajaan Konstitusional dengan sistem pemerintahan Parlementer. Dalam ketatanegaraan Belanda, secara resmi Raja/Ratu merupakan pangkat antara tiga kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.

(1) *Kekuasaan Legislatif*

Raja/Ratu menunjuk seorang wakil untuk menjalankan kekuasaan legislatif, yaitu sebagai anggota Tweede Kamer (Majelis Rendah). Mereka mempunyai hak inisiatif mengajukan rancangan undang-undang. Suatu RUU setelah mendapat persetujuan Tweede Kamer, harus diajukan kepada Eerste Kamer (Majelis Tinggi) untuk



mendapatkan persetujuan. Oleh karena tidak memiliki hak amandemen terhadap suatu RUU, Eerste Kamer hanya dapat menyetujui atau menolaknya. RUU dapat pula diajukan oleh Menteri. RUU yang telah disetujui mulai berlaku setelah diundangkan dalam lembaran negara (Staatsblad)

(2) *Kekuasaan Eksekutif*

Menurut UUD Belanda, kekuasaan eksekutif ada di tangan Raja/Ratu. Karena Raja/Ratu tidak dapat diganggu gugat (onschendbaar), maka kekuasaan Pemerintah diletakkan di tangan kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri dan menteri-menterinya yang bertanggungjawab pada parlemen. Para Menteri mengundurkan diri sehari sebelum pemilu yang diadakan setiap 4 tahun sekali. Raja/Ratu hanya bertindak atas nasehat Raad van Staten (Council of State), juga dapat meminta nasehat dari Ketua Parlemen, ketua-ketua fraksi dalam parlemen, ketua-ketua partai, dan kalangan non-politik. Perdana Menteri diangkat oleh Raja/Ratu dan para Menteri diangkat oleh Raja/Ratu atas rekomendasi Perdana Menteri.

Pemerintah Propinsi terdiri dari 3 organ, yaitu Provinciale Staten (Dewan Perwakilan Propinsi), Gedeputeerde Staten (Badan Pengurus Harian Propinsi), dan Commissaris der Koning/Koningin (Gubernur). Anggota-anggota Provinciale Staten dipilih secara langsung oleh rakyat di Propinsi tersebut untuk masa empat tahun. Gedeputeerde Staten yang anggotanya dipilih oleh Provinciale Staten adalah badan pimpinan dan pelaksana harian Pemerintah Propinsi. Disamping itu Gedeputeerde Staten mempunyai kewajiban untuk mengawasi Gemeente (Kota Madya). Dengan demikian



anggaran/keuangan Gemeente dan lain-lain harus mendapat persetujuan (Gedeputeerde Staten tersebut. Commissaris der Koning/Koningin diangkat oleh Raja/Ratu dan menjadi Ketua Gedeputeerde Staten.

Pemerintah Gemmeente (Kota Madya) mempunyai 3 organ :

- Gemeente Raad (Dewan Kota Madya)
 - College van Burgemeester en Wethouders (pelaksana pemerintahan Kota Madya)
 - Walikota
- Ketua Gemeente Raad dan Ketua College van Burgermeestere en Wethoudres diangkat oleh Raja

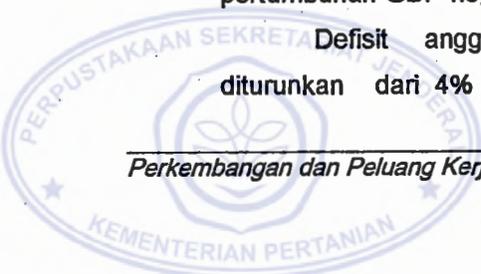
c. *Kekuasaan Yudikatif*

Kekuasaan Yudikatif mempunyai kedudukan yang bebas dari dua kekuasaan lainnya. Raja/Ratu hanya memiliki wewenang untuk mengangkat anggota-anggota Yudikatif. Di Belanda terdapat empat tingkat badan peradilan, yaitu Canton, Rechtbank, Gerechtschot dan Hoge Raad. Anggota-anggota Hodge Raad diangkat oleh Raja/Ratu dari calon-calon yang diajukan oleh Tweede Kamer.

1.3. Sosial Ekonomi

Kegiatan perekonomian Belanda yang mengalami perbaikan yang cukup berarti di tahun 1993 telah berhasil diatasi dan mengalami perbaikan yang cukup berarti di tahun 1994 dan terus membaik dalam tahun 1995. Defisit anggaran Pemerintah terus berhasil dapat diturunkan dari 2,6% GDP (th 1995) menjadi 3% GDP (th 1996) dan 3,25% GDP (th 1997) yaitu melebihi rata-rata pertumbuhan GDP negara-negara Anggota UE (2%).

Defisit anggaran pemerintah terus berhasil dapat diturunkan dari 4% GDP (1995) menjadi 2,3% GDP (1996) dan



sampai sekitar 2% GDP (1997), yaitu dibawah kriteria EMU (3% GDP). Hutang negara tahun 1996 sebesar NFL 408 milyar (77,2% GDP) dan dalam tahun 1997 akan menjadi NFL 412 milyar (72,7% GDP) berarti diatas persyaratan EMU (60% GDP).

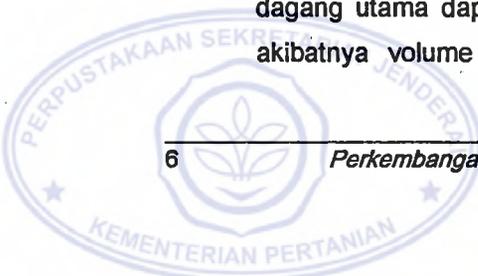
GDP Belanda dalam tahun 1996 meningkat sebesar 2,75% mencapai sekitar NFI 660.25 milyar dibanding dengan tahun 1995 yang hanya mencapai NFI 635 milyar. GDP Belanda merupakan No. 6 terbesar di Uni Eropa, sesudah Jerman, Perancis, Italia, Inggris dan Spanyol serta No. 13 terbesar di dunia.

Laju inflasi Belanda tahun 1996 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 1995 yaitu sebesar 2,1% (1995 = 2,0%). Hal yang mempengaruhi meningkatnya laju inflasi ini antara lain meningkatnya harga minyak di pasar internasional.

Pengetatan kebijaksanaan ekonomi dan keuangan telah berhasil mengurangi defisit anggaran Pemerintah tanpa peningkatan laju inflasi. Hal ini merupakan salah satu persyaratan untuk menjadi anggota EMU (Economic Monetary Union), sehingga diperkirakan Belanda dapat menjadi anggota tersebut tepat pada waktunya yaitu 1 Januari 1999.

Belanda termasuk top ten negara eksportir terbesar dunia dan menduduki posisi No. 5 di UE. Total nilai ekspor Belanda tahun 1996 meningkat sekitar 5,8% dari Nfi, 338,3 milyar (1995) menjadi Nfi. 358,0 milyar, sedangkan total nilai impor meskipun meningkat sekitar 6,1%, namun hanya mencapai Nfi. 316,2 milyar. Dengan demikian neraca perdagangan dalam tahun 1996 mencatat surplus sekitar Nfi. 41,8 milyar. Sebagian besar (79%) ekspor Belanda ditujukan ke UE, terutama Jerman, Perancis dan Belgia/Luxemburg, sedangkan 3,7% ke Amerika Serikat dan hanya 0,48% ke Indonesia.

Membbaiknya perekonomian Belanda terutama disebabkan oleh meningkatnya perdagangan dunia. Belanda sebagai negara dagang utama dapat memanfaatkan perkembangan ini dan sebagai akibatnya volume perdagangan antar negara meningkat sebesar



23.58% atau sebesar 2,342.73 ribu ton sementara ekspornya mengalami penurunan sekitar 0.59% atau sebesar 341.88 ribu ton.

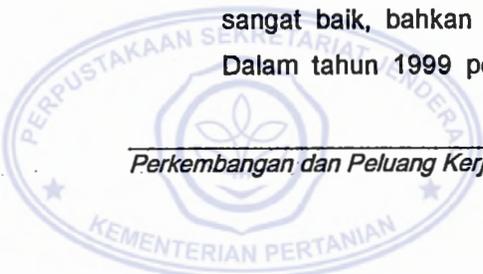
Dalam bidang tenaga kerja Pemerintah Belanda telah berhasil menekan tingkat pengangguran, dalam tahun 1996 tingkat pengangguran menurun menjadi 7,8 % dari jumlah angkatan kerja atau sekitar 500.000 orang (tahun 1995 sebesar 8,3 %). Dalam tahun 1996, Pemerintah Belanda berhasil menciptakan sekitar 100.000 lapangan kerja baru, yang berarti peningkatan sebesar 2 %. Negara-negara Eropa lainnya hanya mengalami peningkatan sebesar 0.2 %, 60 % dari lapangan kerja tersebut berasal dari perusahaan-perusahaan baru.

Bantuan kerjasama pembangunan Belanda kepada negara-negara berkembang dalam tahun 1994 berjumlah Nfl 6.424,1 juta (1,5 % dari Net National Income). Dalam tahun mendatang besar bantuan akan dikaitkan dengan GNP yaitu sekitar 0,9 % GNP dan kebijaksanaan kerjasama pembangunan akan ditinjau kembali disesuaikan dengan kebijaksanaan politik luar negeri dan keamanan.

Kebijaksanaan ekonomi Belanda, sebagai negara dagang utama dengan prinsip perekonomian terbuka dan perdagangan bebas, dititikberatkan bagi perkembangan perdagangan, khususnya pengembangan ekspor, baik ekspor barang maupun jasa. Kebijakan ekonomi Pemerintah Belanda pada pokoknya ditujukan pada 3 permasalahan, yaitu :

- Menanggulangi masalah pengangguran dengan jalan menciptakan lapangan kerja dan pembagian kerja yang ada.
- Mengurangi defisit APBN melalui anggaran Pemerintah, tanpa mengurangi daya beli penduduk
- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan jalan merangsang dunia usaha swasta, serta perbaikan infrastruktur sosial.

Memasuki abad ke-21 perekonomian Belanda berkembang sangat baik, bahkan dapat dikatakan mengalami "booming period". Dalam tahun 1999 pertumbuhan GDP meningkat 3.9% dan dalam



tahun 2000 diperkirakan meningkat 4.5% sedangkan tahun 2001 sekitar 4%. Perkembangan yang sangat baik ini terutama sebagai akibat terus meningkatnya nilai ekspor serta naiknya konsumsi dalam negeri.

Membbaiknya perkembangan ekonomi telah mengakibatkan perbaikan dalam keuangan negara. Anggaran Pemerintah (APBN) sejak tahun 1999 mengalami surplus setelah bertahun-tahun sebelumnya mengalami defisit. Dalam tahun 1999 surplus APBN sebesar 1% GDP, tahun 2000 surplus 1.8% GDP dan untuk tahun 2001-pun diperkirakan akan tetap surplus.

Sebagai akibat membaiknya keuangan negara hutang negara dapat diturunkan dari 62.9% GDP (1999) menjadi 56.5% GDP (2000) dan 52.0% GDP (2001), yaitu dibawah kriteria EMU (60%). Pertumbuhan ekonomi yang pesat telah meningkatkan penciptaan lapangan kerja serta menurunnya jumlah pengangguran dari 292.000 atau 4% dari jumlah angkatan tenaga kerja dalam tahun 1999 menjadi 255.000 (3.5%) dalam tahun 2000 dan akan menurun lagi menjadi 230.000 (3%) pada tahun 2001. Disamping itu daya beli masyarakat juga meningkat secara signifikan.



II. POTENSI NEGARA

2.1. Keadaan Geografis

Nama resmi negara ini adalah *Koninkrijk der Nederlanden* yang merupakan kerajaan konstitusional di Eropa Barat dengan Ibukota Amsterdam. Luas negara sebesar 41.863 km², berpenduduk sebanyak 15.163.000 jiwa dan bahasa resmi yang digunakan adalah Belanda. Agama yang dianut penduduk negeri ini: Katolik Roma (36%), Gereja Reformasi Belanda (19%), Gereja-gereja Reformasi lain (8%), Kepercayaan lain (5%), dan tidak beragama (32%). Pemerintahan berbentuk *Monarki Konstitusional* dengan Kepala Negara yang dipegang oleh Ratu, sedangkan Kepala Pemerintahan dijabat oleh Perdana Menteri. Satuan mata uang negara ini adalah Gulden.

Lebih dari separuh Belanda berada dibawah garis permukaan laut pasang atau permukaan air sungai Rijns, sungai Maas dan sungai Schelde. Agar negeri ini tidak tergenang, di berbagai tempat dibangun instalasi pompa dan tanggul.

Sebagian besar Belanda terbentuk dari pasir, tanah lempung dan tanah gambut dari Kala Pleistosen (sekitar 4-2 juta tahun yang lampau) atau Kala Holosen yang menyusul kemudian. Formasi yang lebih tua pada permukaan hanya terdapat diperbatasan selatan dan timur, serta di Limburg Selatan; yang memiliki plato kapur yang tertutup tanah loss dan disana-sini menonjol lebih dari 100 m, dengan gunung Vaalserburg (321 m) di ujung tenggara sebagai puncak tertinggi di Belanda. Kawasan pasir di daerah timur, tengah, dan selatan Belanda lebih tinggi dibandingkan dengan kawasan tanah lempung pesisir pantai, khususnya di tempat-tempat yang terangkat oleh lapisan es pada Kala Pleistosen sehingga menjadi rangkaian bukit yang panjang.

Perisai bukit pasir pantai merupakan pertahanan terhadap air laut bagi tanah rendah Belanda yang terdiri atas tanah lempung.

Tanggul buatan dan tanah pasang-surut yang direklamasi di D. Ijssmeer (Zuiderzee) tampak menonjol sekali.

Belanda memiliki iklim laut yang lunak pada musim dingin dan cukup hangat pada musim panas. Pengaruh Arus Teluk cukup terasa. Suhu rata-rata 10° C setiap tahun, dengan suhu rata-rata $0 - 1^{\circ}$ C pada bulan Januari dan sekitar 19° C pada bulan Juli. Jika salju turun 20-30 hari berturut-turut pada musim dingin, seluruh permukaan air akan tertutup es. Tingginya curah hujan berkisar pada 655 mm di Ulestrated (Limburg) hingga 780 mm eelde (Drenthe).

2.2. Potensi Alam dan Pertanian

Lahan budidaya pertanian Belanda hanya sekitar 28% dari seluruh daerah Belanda. Dengan pengelolaan tanah secara intensif serta penggunaan peralatan dan metode pertanian modern, hasil pertanian cukup diekspor. Pertanian di negeri ini menghasilkan padi-padian, sayur-mayur, bunga, bit gula, kentang, rami, biji-bijian penghasil minyak nabati, rempah-rempah dan lain-lain. Selain itu, tanaman penghasil benih juga ditanam secara besar-besaran untuk ekspor benih.

Hasil hortikultura yang dibudidayakan dalam rumah-rumah kaca, seperti tomat, anggur, mentimun, kubis dan bunga, merupakan barang komoditas yang bernilai tinggi dari negeri ini. Produksi bunga seperti tulip dan umbi-umbi bunga luar biasa besarnya, bahkan di ekspor sampai ke seberang Samudera Atlantik; hasilnya mencapai ratusan juta gulden setiap tahun.

Sekitar 32% dari seluruh lahan merupakan padang rumput bagi penggembalaan ternak secara permanen. Ternak sapi dipelihara terutama untuk memproduksi susu, keju, mentega dan daging. Sapi Belanda terdiri atas tiga jenis bibit unggul, yakni Holstein hitam-putih, Maas-Rijn-Issel merah-putih, dan Groningen kepala putih. Belanda terkenal karena peternakan kuda, babi, biri-biri dan unggas; yang memenuhi standar tinggi.



III. PERKEMBANGAN KERJASAMA

3.1. Kerjasama Bidang Politik

a. Hubungan dengan Negara/Organisasi Internasional

Untuk mengantisipasi meningkatnya pengaruh badan-badan multilateral. Pemerintah Belanda mengambil langkah-langkah khusus, yakni dengan memperkuat hubungan bilateralnya yang dipandang dapat mendukung posisinya di fora multilateral. Dalam kaitan ini Pemerintah Belanda terus berusaha menggalang kerjasama dengan negara-negara yang memiliki pandangan serta sosial yang sama dalam masalah-masalah tertentu yang menjadi kepentingannya (*like-minded countries*). Sebagai *medium-size power* yang didukung oleh kekuatan ekonomi dan citranya, Belanda berusaha memainkan peran penting dalam mempengaruhi interaksi internasional.

Pada era globalisasi sekarang ini, kebijakan dalam negeri dan luar negeri Belanda saling terkait sangat erat. Dalam hubungan ini, Pemerintah Belanda menekankan perlunya memperhatikan masalah-masalah penting yang dihadapi masyarakat internasional seperti : penghapusan kemiskinan, kerusakan lingkungan hidup, HAM, perdagangan dan migrasi. Dalam konteks ini, kerjasama pembangunan selalu dianggap sebagai bagian integral dari kebijakan luar negeri. Sasaran kebijakan luar negeri Kabinet Koalisi Ungu II adalah :

- Memajukan tertib hukum dan keamanan internasional
- Memajukan ekonomi serta kepentingan nasional lainnya
- Penghapusan kemiskinan secara internasional melalui pembangunan yang berkesinambungan

Dalam kerangka tersebut di atas, prioritas antara lain di letakkan pada upaya memajukan internasional order, integrasi



Eropa, keamanan, penghapusan kemiskinan, HAM, hubungan trans-atlantik, Eropa Selatan, Afrika, dan Timur Tengah.

Dalam konteks integrasi Eropa, Belanda memiliki tiga sasaran utama, yaitu stimulasi integrasi Eropa, percepatan pemekaran anggota Uni Eropa dan pengembangan suatu kebijakan mengenai Eropa Selatan yang koheren dan efektif. Namun demikian, dibidang Common Foreign Security (CFSP) Belanda sebagai negara kecil selalu menentang kecenderungan Uni Eropa untuk berkembang menjadi supra-nasional institution. Belanda menyadari CFSP memiliki potensi untuk memainkan peran yang lebih signifikan tapi hal ini sulit diwujudkan karena adanya potical unanimity dikalangan negara-negara Uni Eropa.

Dalam upaya penghapusan kemiskinan secara internasional, kerjasama pembangunan dengan negara-negara berkembang merupakan instrumen yang paling penting. Kebijakan Belanda dalam kerjasama pembangunan pada dasarnya digantungkan pada beberapa kondisi, yaitu :

- (1) Menerapkan kriteria Good Governance, tingkat kemiskinan, kualitas kebijakan ekonomi
- (2) Penerapan kebijakan diserahkan kepada negara penerima (demand driven)
- (3) Meningkatkan kualitas dengan mengurangi jumlah negara penerima bantuan.

Oleh karenanya Belanda akan memfokuskan kerjasama pembangunan dengan negara yang memiliki kebijakan ekonomi makro yang memadai. Isu demokratisasi dan HAM juga merupakan perhatian utama, termasuk juga menekankan pada proyek-proyek yang berkenaan dengan hal ini.

Dibidang HAM, Belanda selalu berupaya mendorong perlindungan dan kemajuan yang fundamental. Dalam perspektif Belanda, perbedaan budaya tidak dapat dijadikan sebagai



pembenaran atas pelanggaran-pelanggaran HAM dimaksud. Dalam kerangka ini, Belanda menerapkan tiga jalur pendekatan yaitu :

- Fine-Tuning Standards
- Improving Monitoring
- Actual Compliance with Standards

Hubungan dengan negara-negara Asia Tenggara bukan merupakan sesuatu yang mendapat prioritas. Kebijakan luar negeri Belanda saat ini lebih ditekankan pada hubungannya dengan negara-negara Eropa Selatan, Afrika dan Timur Tengah.

b. Hubungan Bilateral dengan Indonesia

(1) Umum

Hubungan RI-Belanda selama ini mengalami pasang surut, namun kedua pihak hingga saat ini berhasil mengatasi setiap permasalahan dengan baik sehingga tidak berkembang menjadi suatu pertentangan yang serius. Dalam kunjungannya ke Belanda tanggal 25 Agustus 2000 Menlu Alwi Shihab di hadapan para anggota Komisi Tetap Urusan Luar Negeri Parlemen Belanda (Tweede Kamer) menyatakan penghargaannya atas terbinanya dengan baik hubungan bilateral antara kedua negara. Indonesia akan terus menempatkan Belanda sebagai "lobbyist"-nya untuk Uni Eropa. Dalam kaitan itu pula, Presiden Abdurrahman Wahid berketetapan untuk mengangkat Mr. Hans van den Broek sebagai "special adviser" Presiden RI untuk "General Affairs", bersama-sama dengan tim "Internasional Advisors" Indonesia lainnya, antara lain mantan Menlu AS Henry Kissinger.

Dengan terbentuknya pemerintahan baru hasil pemilu yang demokratis di Indonesia, hubungan Indonesia-Belanda menuju ke arah yang lebih baik. Terbentuknya



pemerintahan yang demokratis di Indonesia telah menimbulkan kegairahan dari pemerintah Belanda untuk menata kembali hubungan antara kedua negara, khususnya di bidang ekonomi. Kegairahan Pemerintah Belanda ini ditunjukkan dengan kunjungan Menteri Kerjasama Pembangunan Belanda Ms. Eyeline Herfkens ke Indonesia pada bulan Nopember 1999 dan Wakil PM Menteri Ekonomi pada bulan Pebruari 2000 serta kunjungan Menlu Belanda Jozias van Aartsen ke Indonesia pada bulan yang sama.

Upaya meningkatkan hubungan bilateral juga datang dari Indonesia, yaitu dengan kunjungan Presiden Abdurrahman Wahid ke Belanda tanggal 2-3 Pebruari 2000. Dalam kunjungan ini telah ditandatangani "MOU on the Agenda for Renewal and Intensified Bilateral Cooperation" oleh Menlu kedua negara pada tanggal 3 Pebruari 2000.

Pandangan positif pemerintah Belanda terhadap Indonesia juga ditunjukkan melalui kesediaan memberikan pledge pada sidang-sidang CGI, peringanan hutang dalam rangka Paris Club untuk tahun 2000, pemberian beasiswa bagi mahasiswa Indonesia yang belajar di Belanda, ditandatanganinya kerjasama bidang perkeretaapian, diklat maritim, dan keselamatan transportasi serta bantuan kemanusiaan bagi Maluku senilai US\$ 840.336 yang disalurkan melalui "World Food Programme".

Membaiknya hubungan Indonesia-Belanda juga diikuti dengan mulai berkurangnya kegiatan kelompok-kelompok LSM anti Republik Indonesia. Namun demikian, situasi di Maluku, Irian dan Aceh menuntut Indonesia untuk tetap waspada. Untuk kasus Maluku, RMS selalu melakukan demonstrasi menuntut Pemerintah RI

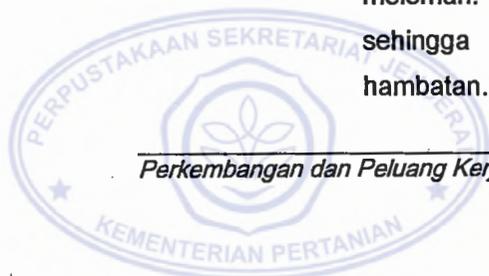


mengirimkan pasukannya ke Maluku. Komunitas Kristen keturunan Maluku yang tinggal di Oosterwolde, Propinsi Friesland, bahkan mulai melakukan penggalangan dana guna membeli senjata yang akan dikirimkan ke Maluku untuk menghadapi kelompok Muslim Militan. Aksi penggalangan dana tersebut mendapat dukungan luas antara lain dari Pemerintahan RMS di Pengasingan. Kelompok Pemuda Maluku Merdeka dan the "National Consultative Group for the Welfare of Mollucans.

(2) Bidang Politik

Sikap Umum Belanda terhadap Indonesia

Pemerintah Belanda memberikan dukungan politik yang kuat kepada Indonesia sejak terbentuknya pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid. Dukungan tersebut pada awalnya didasarkan pada penilaian bahwa Kabinet Presiden Wahid terbentuk secara demokratis dan integritas pemerintahannya dapat dipercaya untuk menegakkan HAM. Namun, akhir-akhir ini terdapat indikasi kuat bahwa Pemerintah Belanda mulai mempertanyakan masa depan Pemerintahan Presiden Wahid. Hal ini disebabkan karena berbagai kerusuhan dan tindak kekerasan masih terus berlangsung di berbagai wilayah Indonesia. Indikatornya terlihat ketika terjadi perdebatan dalam Sidang Komisi Tetap Luar Negeri Parlemen Belanda tanggal 13 Desember 2000 dimana Pemerintah Belanda menilai bahwa situasi politik dalam negeri Indonesia saat ini dinilai cukup gawat dan posisi Presiden Wahid semakin melemah. Kewibawaan pemerintah semakin merosot sehingga reformasi ekonomi dan politik mengalami hambatan. Meskipun demikian Pemerintah Belanda tetap



menegaskan dukungannya terhadap Indonesia mengingat Pemerintahan Presiden Wahid berusaha menegakkan negara demokrasi serta menumbuh kembangkan "civil society".

Sehubungan dengan pemberian bantuan program pembangunan, Pemerintah Belanda menerapkan beberapa kriteria yaitu "Good Governance", tingkat kemiskinan dan kebijakan terhadap masalah sosial dan ekonomi. Dalam berbagai kesempatan dan komunikasi dapat dipahami bahwa faktor yang mempengaruhi sikap Belanda terhadap Indonesia adalah belum diyakini adanya "Good Governance" di Indonesia.

Posisi Indonesia

Pemerintah Indonesia yang baru mempunyai persepsi yang sama dengan Pemerintah Belanda tentang pentingnya good governance. Oleh karena itu Indonesia bertekad mewujudkan "good governance" sebagai cita-cita yang ingin dicapai dan bukan diupayakan secara paksa karena tekanan prasyarat (kondisionalitas) dalam pemberian bantuan pemerintah asing. Hubungan dengan setiap negara pada dasarnya dilaksanakan atas prinsip kesetaraan, saling menghormati dan saling menguntungkan serta tidak ikut campur tangan urusan dalam negeri.

3.2. Kerjasama Bidang Ekonomi

Dasar hubungan kedua negara adalah persetujuan kerjasama Ekonomi ditandatangani di Jakarta pada tanggal 7 Juli 1968. Persetujuan tersebut masih berlaku sampai saat ini secara Tacit Understanding.

Terdapat perkembangan yang cukup signifikan dalam



hubungan ekonomi antara Pemerintah RI dengan Belanda, yaitu dengan dipulihkannya kembali bantuan kerjasama pembangunan Belanda pada tahun 1998 guna mendukung program-program yang diprioritaskan Pemerintah RI.

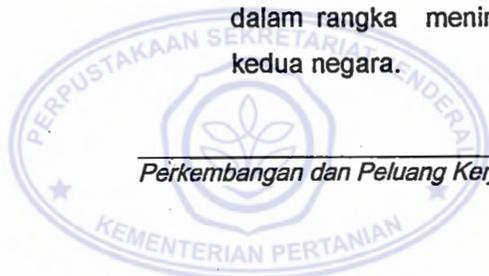
Berdasarkan "Agreement on Economic Cooperation" Indonesia-Belanda telah dikembangkan kerjasama melalui wadah Komisi Bersama (Mixed Commission). Komisi Bersama ini telah memainkan peran yang sangat penting dalam peningkatan hubungan dan kerjasama ekonomi antara kedua negara melalui program-program yang dikembangkan di bawah koordinasi kelompok-kelompok kerja (Working Group) sektoral. Kerjasama ekonomi di bawah Mixed Commission mencakup bidang kerjasama Trade and Investment; Agriculture and Forestry; Transport and Communication; Energy; Science and Technology; Public Works; Housing and Spatial Planning.

Setelah tertunda beberapa kali, Sidang ke-17 Komisi Bersama RI-Belanda direncanakan akan diselenggarakan di Den Haag tanggal 27-28 Februari 2001.

Kerjasama ekonomi Indonesia-Belanda dimasa yang akan datang diharapkan akan dapat melibatkan lebih banyak lagi peranan sektor swasta. Namun demikian terdapat beberapa hambatan yang mungkin akan menjadi ganjalan, yaitu : masih berlangsungnya instabilitas politik dan keamanan di Indonesia serta belum terwujudnya kepastian hukum.

Komisi Bersama Ekonomi

Hubungan ekonomi Indonesia-Belanda didasarkan pada Agreement on Economic Cooperation yang ditandatangani pada tahun 1968 di Jakarta. Berdasarkan perjanjian tersebut (pasal 20) dibentuk suatu Komisi bersama oleh Dirjen HELN masing-masing negara guna menindak lanjuti kesepakatan kerjasama ekonomi kedua negara dalam rangka meningkatkan hubungan ekonomi dan perdagangan kedua negara.



kedua negara.

Sejak krisis ekonomi di Indonesia, kerjasama dalam kerangka Komisi Bersama menunjukkan penurunan sehingga sidang yang biasanya dilakukan sekali setahun mengalami hambatan sejak tahun 1996. Pada tahun 1998 diadakan Sidang Komisi Bersama namun dalam bentuk Chairman's Meeting dan bukan full fledged meeting sebagaimana mestinya. Tujuan Chairman Meeting adalah untuk meninjau kembali kerjasama ekonomi kedua negara karena adanya perubahan yang signifikan baik di Indonesia maupun di Belanda.

Sampai saat ini kerjasama dalam kerangka Komisi Bersama belum menunjukkan keaktifan kembali dan perlu mendapatkan perhatian terutama karena luasnya cakupan kerjasama yang meliputi 7 kelompok kerja yaitu bidang perdagangan dan investasi, pertanian, riset, dan teknologi, pekerjaan umum, perumahan dan tata ruang, kehutanan dan energy.

Pemberian bantuan kerjasama pembangunan oleh Pemerintah Belanda didasarkan atas prinsip "demand driven" dalam arti penentuan proyek-proyek kerjasama ditentukan oleh pihak Indonesia.

Dalam tahun 2000 Pemerintah Belanda telah memberikan bantuan dalam bentuk hibah sebesar US\$ 64.3 juta yang disalurkan melalui lembaga-lembaga multilateral, seperti UNDP, World Bank, UNICEF, UNFPA dan lain-lain. Bantuan tersebut diberikan untuk membiayai program-program good governance, poverty alleviation, dan environment.

Untuk tahun 2001 dalam sidang ke-10 CGI di Tokyo Oktober 2000, Pemerintah Belanda telah menyampaikan pledge bantuannya sebesar US\$ 65 juta dalam bentuk hibah untuk membiayai program Good Governance, poverty alleviation serta Water/marine resource management.



Restrukturisasi Hutang

Dalam rangka Paris Club, Belanda telah memberikan bantuan untuk peringanan hutang sebesar Nfl 61.1 juta untuk tahun 2000, sedangkan untuk tahun 2001 telah disediakan dana sebesar Nfl 104 juta.

Bantuan Kemanusiaan dan Bantuan Lainnya

Dalam tahun 2000 Belanda telah memberikan bantuan kemanusiaan untuk Maluku sebesar Nfl 13.5 juta. Di samping itu diberikan bantuan untuk proyek HAM melalui NGO sebesar Nfl 3 juta, serta proyek-proyek kecil lainnya senilai Nfl 1 juta. Dalam kaitan bantuan kemanusiaan ini, Pemerintah Belanda juga telah mengalokasikan dana bagi pembangunan kembali Maluku sebesar Nfl 5 juta.

Perdagangan

Kegiatan perdagangan sempat mengalami penurunan sampai tahun 1999. Namun sejak kwartal pertama tahun 2000 terdapat kecenderungan peningkatan kembali aktifitas perdagangan kedua negara. Dalam tahun 1999, nilai ekspor Indonesia ke Belanda sebesar US\$ 1.128 milyar, sedangkan impor Indonesia dari Belanda senilai US\$ 305 juta. Untuk tahun 2000 pada periode Januari - September nilai ekspor Indonesia ke Belanda telah mencapai US\$ 967 juta, sementara impor Indonesia dari Belanda (periode Januari-September) bernilai US\$ 249 juta.

Upaya peningkatan ekspor Indonesia ke Belanda masih menghadapi berbagai hambatan tarif dan non tarif. Pada umumnya hambatan yang diberlakukan merupakan hambatan yang diterapkan secara bersama oleh Uni Eropa (Common Custom Policy). Secara umum hambatan non tarif yang masih sering dihadapi oleh Indonesia adalah kuota (terutama tekstil dan produk-produk tekstil) dan anti dumping Measures. Untuk produk-produk pertanian dan makanan olahan, ekspor Indonesia sering mengalami hambatan berupa persyara-



tan standar sanitasi (Sanitary and phytosanitary standards SPS) dan atau persyaratan standar packaging, sementara terhadap ekspor kayu dan hasil hutan masih diberlakukan persyaratan ecolabelling.

Produk-produk ekspor yang memberikan kontribusi terbesar pada ekspor Indonesia ke Belanda adalah tekstil dan pakaian jadi, minyak nabati, kayu olahan, teh, coklat, dan rempah-rempah, perabotan, sepatu, batu-bara dan makanan ternak. Produk-produk ekspor yang menurun dan membutuhkan pembinaan khusus adalah kertas, karton dan barang kertas lainnya, plywood, triplek, pakaian laki-laki/anak bukan rajutan, barang kimia organik, tembakau lembaran/irisan dan sisanya, produk logam tidak mulia dan mesin pembangkit tenaga digerakan listrik. Sedangkan produk ekspor baru terdiri alat listrik, elektronik, kimia, perabotan, minyak hewan, kain tenun, perkakas dapur dan lain sebagainya.

Komoditas utama impor dari Belanda ke Indonesia ialah peralatan telekomunikasi, scrap baja, ingot/besi, pesawat terbang, petroleum oil, piston engines, produk hidrokarbon, minyak wangi, bahan plastik, kertas dan produk yang terbuat dari bahan baku susu seperti (keju, yoghurt dan lain-lain).

Realisasi Perdagangan

Pada umumnya hubungan ekonomi bilateral Indonesia-Belanda mempunyai intensitas yang cukup tinggi, baik dibidang perdagangan, investasi maupun pariwisata. Sejak 25 Maret 1992 Indonesia menolak bantuan pembangunan Belanda dan hubungan dilandasi oleh persamaan derajat. Sekarang terbukti bahwa tanpa adanya bantuan, justru hubungan ekonomi lebih baik dan meningkat. Pihak Belanda khususnya sektor swastanya merasa agak dirugikan dengan diputuskannya bantuan pembangunan oleh pihak Indonesia dan mereka selalu mendesak Pemerintahnya untuk membantu melancarkan usahanya dengan pihak Indonesia.

Neraca perdagangan Indonesia - Belanda dalam periode



tahun 1992 - 2000 menunjukkan saldo positif bagi Indonesia, seperti yang terlihat pada Tabel 1.

Dalam tahun 2000 volume perdagangan mengalami peningkatan sebesar US\$ 578,3 juta (34,21%) dibandingkan dengan keadaan tahun 1999, hal ini disebabkan oleh meningkatnya nilai ekspor Indonesia sebesar US\$ 490,6 juta (36,51%) dan peningkatan nilai impor Indonesia dari Belanda sebesar US\$ 37,7 juta (9,52%). Dengan demikian neraca perdagangan Indonesia - Belanda mencatat surplus di pihak Indonesia sebesar US\$ 1.399,8 juta.

Tabel 1. Neraca Perdagangan Indonesia – Belanda (dalam jutaan US dollar)

Tahun	Ekspor	Impor	Saldo	Volume
1996	1.666,6	493,0	+ 1.173,6	2.159,6
1997	1.842,3	565,9	+ 1.276,4	2.408,2
1998	1.512,2	338,3	+ 1.173,9	1.850,5
1999	1.343,6	396,7	+ 996,9	1.690,3
2000	1.834,2	434,4	+ 1.399,8	2.268,6

Sumber : Badan Pusat Statistik

Produk-produk Indonesia maupun Belanda sudah semakin dapat diterima di kedua negara. Para pengusaha kedua negara memanfaatkan potensi pintu masuk di wilayah masing-masing, yaitu Belanda mulai memanfaatkan Indonesia sebagai pasar produknya untuk wilayah Asia Pasifik terutama terhadap pasar/ekonomi Indonesia yang memang berkembang demikian pesat. Sebaliknya Indonesia juga memanfaatkan Belanda sebagai salah satu pintu masuk yang potensial bagi produk-produk Indonesia ke pasar Eropa.

Produk utama ekspor Indonesia ke Belanda yaitu tekstil dan pakaian jadi, kayu olahan, minyak nabati, perabotan, sepatu, tembakau, sayuran dan umbian, makanan temak, rempah-rempah, cacao, kopi, teh, rubber products.

Produk-produk ekspor yang memberikan kontribusi terbesar pada ekspor Indonesia ke negeri Belanda adalah sebagai berikut :



- Tekstil dan pakaian jadi	22,57%
- Minyak nabati	13,41%
- Kayu olahan	12,28%
- Kopi, teh, cokelat dan rempah-rempah	6,41%
- Perabotan	6,06%
- Sepatu	5,93%
- Batubara	5,88%
- Makanan ternak	4,97%

Hambatan-hambatan perdagangan

1. Hambatan Non Tariff.

- a. Perubahan kandungan Aflatoxin dalam impor makanan ternak UE dan Belanda seperti dengan surat edaran Menteri Pertanian Belanda No. 7642 tanggal 15 Desember 1994, bahwa ada perubahan kandungan aflatoxin dalam impor produk makanan ternak yang menetapkan kandungan maximum. Aflatoxin jenis B.1. yang diperbolehkan untuk produk makanan ternak sebanyak 0.2 mg/kg dengan tingkat kelembaban 12%, sehingga impor produk makanan ternak yang melebihi ketentuan tersebut dilarang.
- b. Tuduhan Dumping. Masih ada tuduhan dumping terhadap beberapa produk ekspor Indonesia antara lain : sepeda, footwear, cotton fabrics, polyester fabrics, polyester yarn, glutamic acid, polyester textured filament yarn, unbleached cotton.
- c. Dalam menjalankan kebijaksanaan perdagangan luar negeri Belanda masih mengaitkan dengan masalah : aspek lingkungan (environment aspect), hak asasi manusia, ISO 9000.

2. Hambatan Tarif



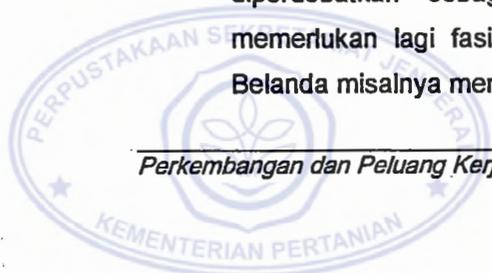
- a. Dengan dikeluarkannya SK GSP UE baru tentang peningkatan tarif secara "graduation" yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1995 untuk masa 4 (empat) tahun sampai dengan tahun 1998. Untuk beberapa komoditi tergolong sensitive dari Indonesia antara lain : kayu, alas kaki telah mulai dikenakan GSP menjadi (kayu 3%, alas kaki 20% dari harga C & F), yang sebelumnya 0% (nol %).
- b. Pemberian tarif yang berbeda antara negara berkembang Amerika Latin dan Indonesia, dimana ekspor bubuk pisang Amerika Latin dengan GSP dibebaskan dari bea masuk, sedangkan Indonesia harus membayar bea masuk 6% walaupun dengan fasilitas GSP.

3. Hambatan Lainnya

Hambatan-hambatan lainnya yang ada di pihak Indonesia sendiri diantaranya :

- a. Ongkos angkut kurang kompetitif dibanding dengan negara lainnya yang menghasilkan barang serupa seperti Thailand, RRC, Malaysia, Spanyol dll.
- b. Cargo konsolidasi (pengumpulan barang) lemah.
- c. Pengiriman barang sering tidak tepat waktu/terlambat.
- d. Produk Indonesia kurang berkembang dibandingkan dengan produk-produk negara lain, sedangkan harga barang umumnya masih mahal.

Bea masuk terhadap komoditas pertanian tetap besar walaupun dengan fasilitas GSP. Hal ini merupakan kendala bagi ekspor barang pertanian Indonesia dan negara berkembang umumnya. Dengan demikian perlu peningkatan lobbying melalui European Commission di Brussel, terlebih lagi Indonesia sering diperdebatkan sebagai negara yang sudah maju dan tidak memerlukan lagi fasilitas GSP padahal 60% ekspor Indonesia ke Belanda misalnya memanfaatkan fasilitas ini.



Non-tarif barriers melalui sertifikat mutu standar pengepakan barang, masalah HAM, tenaga kerja, lingkungan dan lain sebagainya merupakan alat untuk menekan negara berkembang dan negara pesaing lainnya.

Dari Indonesia sendiri terutama, perlu ada pemikiran penanggulangan masalah transportasi. Bila dibandingkan dengan negara-negara pesaing seperti RRC, Thailand, Malaysia dan India, harga f.o.b. Indonesia relatif rendah, namun demikian harga pasar di Belanda jauh lebih tinggi (3 sampai 5 kali lipat), karena biaya transportasi dari Indonesia yang tidak dapat bersaing dengan negara-negara tersebut diatas.

Perlu ada pembinaan yang terus menerus pada para produsen/eksportir Indonesia mengenai tata cara perdagangan internasional, terutama mengenai praktek dan dokumentasi transaksi yang diperlukan disiplin dalam waktu pengiriman dan isi kontrak.

Khusus untuk negeri Belanda, mengingat terbatasnya anggaran dan tidak adanya bantuan luar negeri, maka biaya untuk analisa pasar dan promosi dagang perlu ditingkatkan untuk menghadapi persaingan yang semakin tajam.

Cabang perusahaan Indonesia yang telah ada di Negeri Belanda banyak yang terancam gulung tikar karena kurangnya financial back up dari bank-bank komersil di Indonesia, padahal cabang-cabang perusahaan Indonesia di Belanda ini dapat membantu memajukan ekspor Indonesia.

Adanya kebijaksanaan yang semakin proteksionistis dari ME, terutama untuk barang-barang ekspor seperti bahan baku makanan ternak, tembakau, pakaian jadi, kayu lapis dan lain-lain. Belanda sebagai anggota ME harus menyesuaikan diri dengan kebijaksanaan tersebut.



Investasi

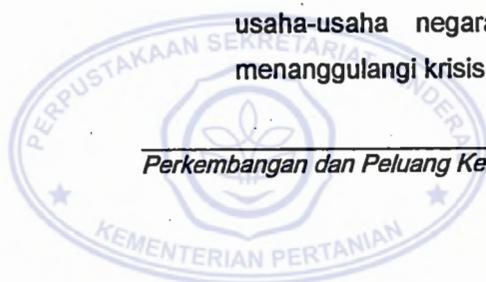
Realisasi investasi langsung (FDI) Belanda di Indonesia merosot tajam dari US\$ 411,8 juta (1998) menjadi US\$ 38,2 juta pada tahun 1999. Pada tahun 2000 ini belum terdapat perkembangan yang berarti dalam investasi baru. Kalaupun terdapat arus investasi Belanda ke Indonesia, hal itu lebih merupakan investasi portofolio atau investasi yang ditujukan untuk menambah/memperkuat equity dari investasi yang sudah ada. Sampai saat ini tidak diperoleh informasi atau data yang menunjukkan adanya investasi baru Belanda di Indonesia.

Menurut kalangan dunia usaha Belanda, hal ini lebih dikarenakan bahwa perubahan situasi di Indonesia baru terjadi dalam beberapa bulan, sementara keputusan untuk melakukan investasi atau ekspansi usaha membutuhkan waktu yang cukup panjang. Selain itu, masalah kepastian hukum dan stabilitas sosial/politik merupakan salah satu "concern" dunia usaha untuk berhubungan dengan Indonesia.

Kunjungan Menteri Ekonomi Belanda Mrs. A. Joritsma ke Indonesia pada akhir bulan Pebruari 2000 yang lalu dengan membawa sejumlah pengusaha besar (captain of industry) Belanda, diharapkan dapat lebih mendorong masuknya kembali investasi Belanda di Indonesia dalam tahun 2000 dan tahun-tahun berikutnya.

Kerjasama Pembangunan Indonesia – Belanda

Dalam pertemuan Consultative Group on Indonesia (CGI) di Paris, untuk pertama kalinya pemerintah Belanda hadir sebagai peninjau dalam pertemuan tersebut sebagai reaksi positif pemerintah Belanda terhadap 2(dua) buah surat Presiden RI kepada PM Wim Kok yang meminta bantuan pemerintah Belanda terhadap rescheduling utang swasta Indonesia dan dukungan pemerintah Belanda terhadap usaha-usaha negara-negara maju dalam membantu Indonesia menanggulangi krisis keuangan dan ekonomi.



Sehubungan dengan pulihnya kerjasama pembangunan dengan Indonesia. Belanda menyediakan bantuan sebesar NFL 136 juta bagi bantuan restrukturisasi hutang Indonesia. Selain itu akan disediakan pula bantuan tambahan kepada Indonesia sekitar NFL. 50.2 juta di atas dana bantuan ODA (Official Development Assistance) Belanda yang telah ditetapkan sebesar 0.8% GDP, sehingga bantuan kerjasama pembangunan untuk tahun anggaran 1999 akan berjumlah sekitar NFL. 6.8 milyar.

Setelah melakukan kunjungan ke Indonesia bulan Nopember 1999, Menteri kerjasama Pembangunan Belanda. Mrs. Eveline Herfkens memberikan kesan-kesan antara lain :

- Menteri Herfkens sangat terkesan dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah baru Indonesia di bawah Presiden Abdurrahman Wahid. Pemerintah Indonesia mempunyai "political will" untuk melaksanakan reformasi, integritasnya tidak perlu diragukan dan dapat dipercaya. Menteri Herfkens secara spontan menyatakan kesediaan pemerintah Belanda untuk membantu Indonesia melalui bantuan kerjasama pembangunan yang telah terhenti sejak tahun yang lalu.
- Berkaitan dengan bantuan yang akan diberikan, Menteri Herfkens menyatakan bahwa pemerintahnya akan membahas lebih lanjut mengenai jumlah dan bentuk bantuan yang akan diberikan. Pembahasan tersebut juga akan mempertimbangkan prioritas pembangunan Indonesia serta program yang rinci dan konkrit. Secara informal Menteri menyatakan bahwa kemungkinan bantuan akan berjumlah sekitar puluhan juta gulden.

Implikasi Bilateral Penolakan Bantuan Belanda

Kebijaksanaan Pemerintah Indonesia untuk menolak bantuan Belanda selain berdimensi sekaligus juga berdampak internasional, nasional serta bilateral. Dalam tingkat bilateral Indonesia - Belanda, mulai 25 April 1992, "disbursement" terhadap proyek dihentikan.



Indonesia meminta agar Belanda tidak lagi menyelenggarakan Sidang IGGI.

Pada dasarnya seluruh bantuan luar negeri Belanda kepada Indonesia, baik yang berasal dari dana yang disediakan dan dikoordinir oleh Kementerian Kerjasama Pembangunan Belanda maupun bantuan yang berasal dari dana khusus dari berbagai Kementerian serta lembaga dan organisasi lainnya ditolak.

Bantuan yang disalurkan melalui LSM berdasarkan ketentuan Menteri Dalam Negeri tanggal 24 April 1992, tidak boleh diterima oleh LSM Indonesia. Bantuan-bantuan tersebut termasuk :

- a. Bantuan Belanda langsung ke LSM Indonesia;
- b. Bantuan Belanda melalui LSM Belanda kepada LSM Indonesia;
- c. Bantuan Belanda yang tidak "earmarket" untuk Indonesia bercampur dengan dana umum dari LSM disalurkan ke LSM Indonesia juga perlu ditolak.

Kerjasama Perekonomian Pasca 24 Maret 1992

Tanggapan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPENAS atas surat Menteri Perekonomian Belanda dengan suratnya No. BEB/DSE/SBF/95056787 tanggal 18 Agustus 1995 adalah sebagai berikut :

- a. Berkenaan dengan rencana Belanda akan membantu pengusaha-pengusaha Belanda dalam melakukan investasi dan meningkatkan daya saing produk-produknya di Indonesia tidak merupakan masalah sepanjang *tidak diberikan kepada Pemerintah Indonesia*.
- b. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan semangat baru dalam rangka meningkatkan hubungan ekonomi antara kedua negara melalui perdagangan, investasi dan pariwisata, dan *tidak lagi atas dasar hubungan pemberi dan penerima bantuan*.
- c. Dalam rangka kerjasama sosial antara lembaga sosial Belanda dan Indonesia, juga *diperkenankan apabila Pemerintah Belanda*

bermaksud membantu lembaga sosial Belanda, misalnya bantuan hibah untuk mendirikan rumah sakit, atau sekolah kejuruan swasta di Indonesia lewat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) / Lembaga Sosial Belanda.

- d. Di bidang pendidikan juga *diperbolehkan diadakan pertukaran mahasiswa dan mahaguru antara universitas* berdasarkan prosedur yang berlaku, *sepanjang tidak dinyatakan sebagai program bantuan luar negeri dari Belanda kepada Indonesia.*

(Berdasarkan Surat BAPPENAS No. 5496/MK/9/1995 tanggal 21 September 1995 dan No. 5473/MK/9/1995 tanggal 23 September 1995).

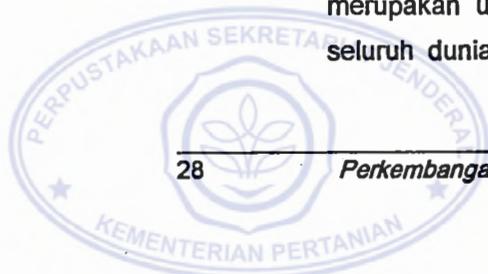
Usaha untuk Meningkatkan Hubungan Bilateral Dengan Dasar Saling Menghargai dan Saling Menguntungkan

Kebijaksanaan Indonesia untuk menolak bantuan Belanda karena dijadikan sebagai "political leverage", tidak berarti Indonesia bermusuhan dengan masyarakat maupun Pemerintah Belanda. Kerjasama di bidang lain, di luar bantuan atas dasar saling menghargai dan saling menguntungkan perlu diteruskan dan ditingkatkan, antara lain dengan mengirimkannya pejabat pemerintah dan misi-misi dagang, sebagai berikut :

1. **Kunjungan Dr. Arifin Siregar, Menteri Perdagangan RI ke Belanda**

Kunjungan ke Belanda dilaksanakan pada tanggal 24 - 28 April 1992 dengan penugasan khusus, merupakan pertanda keinginan Indonesia. Kunjungan tersebut disambut baik pihak Belanda.

Pada kesempatan tersebut Menteri Perdagangan meresmikan berfungsinya Indonesia Trade Centre and Distribution Centre di Rotterdam. Pembangunan tersebut merupakan usaha pertama sekali dilakukan oleh Indonesia di seluruh dunia dalam rangka usaha menggalakkan ekspor non-



migas. Pemilihan lokasi di Rotterdam merupakan pengakuan peranan Belanda sebagai salah satu gate-way penting bagi ekspor Indonesia di pasaran internasional terutama di Eropa yang merupakan pasar potensial.

2. Kunjungan Ir. Wardoyo, Menteri Pertanian RI ke Belanda

Kunjungan ke Belanda dilaksanakan pada tanggal 15-19 September 1992. Menteri Pertanian RI berkesempatan mengadakan pertemuan dengan Menteri Pertanian Belanda, dengan hasil pertemuan sebagai berikut :

- Pihak Belanda mengharapkan ditemukannya model kerjasama baru yang benar-benar menguntungkan kedua belah pihak seperti halnya dalam bidang penelitian dan pelatihan/pendidikan pertanian.
- Indonesia dan Belanda sependapat untuk saling meningkatkan kerjasama ekonomi dan perdagangan, termasuk penanaman modal di bidang pertanian.

3. Kunjungan Wakil Perdana Menteri/Menteri Urusan Ekonomi Belanda

Pada akhir bulan Februari s/d awal Maret 2000, Delegasi Belanda yang dipimpin oleh Mrs. Annemarie Jorritsma (Deputy Prime Minister/Minister of Economic Affairs) telah berkunjung ke Indonesia. Delegasi Belanda terdiri dari 75 pengusaha mewakili 50 perusahaan Belanda dan pejabat Pemerintah Belanda. Maksud kunjungan adalah untuk melihat kemungkinan investasi dan perdagangan dengan Indonesia. Turut dalam delegasi adalah pengusaha Belanda dan staf Ministry of Economic Affairs/SENTER yang terlibat dalam proyek bantuan (grant) Belanda ke pihak swasta Indonesia.

Pada awal tahun 1999, Tim dari SENTER/Ministry of Economic Affairs telah menemui Menteri Pertanian untuk membicarakan bidang-bidang yang akan dibantu Belanda di



sektor pertanian dalam rangka membantu mengatasi krisis ekonomi. SENTER telah menyetujui memberikan bantuan sebesar NGL 2.700.000 untuk pengembangan hortikultura dan perikanan. Masa pelaksanaan adalah 2 (dua) tahun (1999-2000). Proyek baru yang disetujui adalah DFL 3.200.000 untuk pengembangan sayur-sayuran, buah-buahan, kentang dan unggas dengan masa pelaksanaan tahun 2000-2001.

Bantuan Pemerintah Belanda merupakan "grant" yang disalurkan melalui perusahaan swasta Belanda bekerjasama dengan perusahaan swasta Indonesia (G to P, P to P). Besarnya grant untuk satu proyek maksimum DFL 800.000 dan pihak swasta (Belanda dan Indonesia) juga menyediakan "matching fund".

Sidang Komisi XVII Komisi Bersama Indonesia-Belanda

Sidang Komisi ke-17 Komisi Bersama Indonesia-Belanda dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 27-28 Pebruari 2001. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Direktur Jenderal HELN, Departemen Luar Negeri dengan anggota dari beberapa instansi terkait.

Dalam sidang Komisi tersebut bertujuan antara lain :

- a. Identifikasi hambatan-hambatan dalam hubungan bilateral perdagangan dan investasi Indonesia-Belanda.
- b. Merumuskan rekomendasi bagi pemerintah kedua negara untuk mengatasi hambatan-hambatan pada butir a.
- c. Melakukan evaluasi atas kinerja ke 6 (enam) "Working Group" dibawah "Mixed Commission".

Masalah yang dibahas dalam pembahasan sidang komisi bersama adalah : kondisi ekonomi Indonesia dan Belanda terutama dalam sektor-sektor yang ditangani kelompok-kelompok kerja dibawah kerangka komisi gabungan; kerjasama antara UKM Indonesia dan



Belanda; potensi peran Belanda sebagai jembatan Indonesia kepasar Uni Eropa; penguatan "Good Corporate Governance" di Indonesia.

Kesepakatan yang dihasilkan dalam sidang komisi bersama antara lain pentingnya reformasi khususnya dibidang ekonomi di Indonesia dalam rangka meningkatkan kerjasama antara UKM Indonesia-Belanda, maka Menteri Perdagangan Luar Negeri Belanda disertai delegasi sektor UKM akan berkunjung ke Indonesia pada awal tahun 2002. Pihak Belanda menyatakan kesiapannya untuk melanjutkan dukungan bagi pelaksanaan "Good Corporate Governance" di Indonesia. Kelanjutan dari "Working Group" sektor pertanian dan kehutanan akan didiskusikan pada saat kunjungan Sekretaris Jenderal Kementerian Belanda ke Indonesia pada waktu yang belum ditentukan. Disepakati pula bahwa untuk membahas proyek KTNB di Indonesia pada pertemuan "Mixed Commission" yang akan datang.

3.3. Kerjasama Teknik

a. Working Group on Agriculture Indonesia-Belanda

Working Group on Agriculture (WGA) dibentuk oleh Komisi Bersama (Mixed Commission) Indonesia-Belanda dalam sidangnya yang pertama pada tahun 1982. Pada dasarnya, WGA bertujuan :

- Mengembangkan terjalinnya kerjasama di bidang pertanian antara Indonesia dan Belanda, baik dari instansi pemerintah maupun swasta;
- Meningkatkan investasi swasta di bidang pertanian antara kedua belah pihak.

Sidang WGA diadakan satu tahun sekali dengan tempat penyelenggaraan (tuan rumah) bergantian di Indonesia dan



Belanda. Hingga saat ini Sidang WGA telah berlangsung sebanyak 7 kali, dengan rincian sebagai berikut:

- Sidang WGA I di Jakarta tanggal 9-13 April 1984;
- Sidang WGA II di Den Haag tanggal 10-14 Juni 1985;
- Sidang WGA III di Jakarta tanggal 21-24 Okt 1986;
- Sidang WGA IV di Den Haag tanggal 10-11 Nop 1987;
- Sidang WGA V di Jakarta tanggal 23-27 Jan 1989;
- Sidang WGA VI di Den Haag tanggal 25-29 Juni 1990;
- Sidang WGA VII di Jakarta tanggal 12-15 Februari 1992.

Melalui forum WGA ini telah banyak terjalin kerjasama ekonomi antara kedua negara, terutama antara swasta Indonesia dan Belanda dalam bentuk joint venture (kerjasama patungan).

Dalam Sidang ke-15 Komisi Bersama Indonesia-Belanda di Den Haag tanggal 18-19 Maret 1996, Working Group on Agriculture diminta untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan dan kemajuan yang telah dicapai serta menyiapkan langkah tindak lanjut agar peranan WG lebih meningkat. Beberapa hasil pembahasan di bidang pertanian pada Sidang ke-XV Komisi Bersama Indonesia-Belanda, sebagai berikut :

- Walaupun WGA secara resmi tidak mengadakan pertemuan khusus, namun anggota WG kedua belah pihak saling bertukar pikiran mengenai kemajuan yang telah dicapai sebelumnya.
- Kedua belah pihak sangat gembira dengan kemajuan yang dicapai dalam kerjasama di bidang bioteknologi pertanian, dan sangat berharap agar kerjasama ini dikemudian hari dapat ditindaklanjuti oleh para pengusaha (swasta), mengingat aplikasi bioteknologi di bidang pertanian khususnya dalam penyediaan bibit-bibit unggul mempunyai prospek komersial yang sangat cerah. Hal ini mengingat



bahwa salah satu kendala utama yang kita hadapi dalam pengembangan agribisnis adalah tidak tersedianya bibit yang bermutu dalam jumlah yang memadai.

- Dalam kaitan ini kedua belah pihak sepakat agar kepiawaian Belanda di bidang bioteknologi pertanian dapat dimanfaatkan oleh Indonesia dalam mengembangkan agribisnis terutama di bidang hortikultura. Delegasi Indonesia menyatakan bahwa saat ini beberapa swasta Belanda sedang menjajaki kerjasama di bidang pembibitan sayur-sayuran dengan mitra Indonesia, dan sangat berharap agar kerjasama ini dapat segera terealisasi.
- Delegasi Indonesia menyatakan bahwa selain kerjasama di bidang bioteknologi, Departemen Pertanian sangat berminat untuk memperluas di bidang lain, terutama di bidang perikanan dan peternakan termasuk kerjasama dalam pengembangan sumberdaya manusia. Delegasi Belanda menyambut baik usulan ini dan menyatakan bahwa sebenarnya banyak sekali pengusaha-pengusaha Belanda yang ingin mengadakan kerjasama dengan pengusaha Indonesia dalam bidang ini tetapi belum menemukan partner yang cocok. Delegasi Belanda juga mengemukakan bahwa Pemerintah Belanda terus berupaya memberikan kemudahan-kemudahan bagi para investornya untuk memperlancar kerjasama dengan swasta Indonesia.
- Secara umum kedua belah pihak sepakat untuk lebih meningkatkan kerjasama ekonomi dan perdagangan di bidang pertanian, dan mengharapkan agar pihak swasta dapat lebih aktif dan mengambil peranan yang lebih besar dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Oleh karena itu disepakati agar dalam sidang yang akan datang, pihak swasta mendapat kesempatan yang lebih besar dalam dialog investasi dan perdagangan.



b. Holland Agro 1993

Kegiatan yang diorganisir oleh Kedutaan Besar Belanda di Jakarta bersama INA (Indonesia Netherlands Association) adalah dalam rangka memperkenalkan keahlian Belanda di Bidang Pertanian yang diselenggarakan pada tanggal 22 - 23 Juni 1993. Holland Agro dibuka secara resmi oleh Menteri Pertanian RI pada tanggal 22 Juni 1993 dan berlangsung di Hotel Le Meridien, Jakarta.

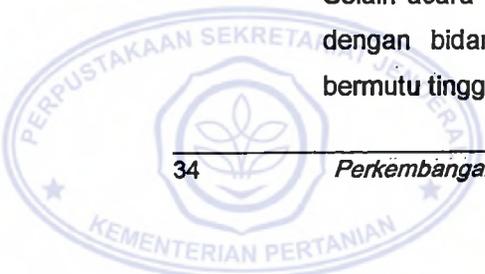
c. Kunjungan Resmi Mr. Piet Bukman (Menteri Pertanian, Perikanan dan Pengelolaan Lingkungan Belanda) ke Indonesia

Kunjungan dilaksanakan pada tanggal 24 s/d 27 Nopember 1993. Selama kunjungan di Indonesia, Menteri Pertanian, Perikanan dan Pengelolaan Lingkungan Belanda telah berkesempatan melaksanakan kunjungan kehormatan kepada Bapak Wakil Presiden RI, Menteri Koordinator EKUIN, Menteri Kehutanan dan Menteri Pertanian.

Dalam pertemuan dengan Menteri Pertanian RI disepakati untuk melaksanakan kerjasama "Joint Feasibility Study on the Further Enhancement Plant Breeding Research in Indonesia (BIOBREES)" yang akan dibiayai dan dilaksanakan oleh Badan LITBANG Pertanian Indonesia dan CPRO-DLO Belanda.

d. Holland Agro 1994

Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 31 Mei s/d 4 Juni 1994 telah dibuka resmi oleh Menteri Pertanian yang didampingi oleh Ir. G.J.M. Braks, Mantan Menteri Pertanian Belanda pada tanggal 31 Mei 1994 di Hotel Le Meridien, Jakarta. Selain acara pameran juga berlangsung seminar yang berkaitan dengan bidang perunggasan dan produksi benih hortikultura bermutu tinggi.



e. Holland Agro 1995

Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 5 s/d 6 Juni 1995, Pameran dibuka secara resmi oleh Menteri Pertanian RI dan Seminar dibuka oleh Menteri Urusan Pangan yang didampingi oleh Mr. Piet Bukman, Mantan Menteri Pertanian Belanda pada tanggal 5 Juni 1995 di Hotel Le Meridien, Jakarta.

Selain acara pameran juga berlangsung seminar sehari dengan thema "Seminar on Food Production and Processing" khususnya Daging, Ayam dan Kentang. Selain acara tersebut diatas, Delegasi Belanda juga berkesempatan mengadakan kunjungan ke Proyek PIR Kelapa sawit milik PT. Perkebunan XI di Banten Selatan (Perkebunan Kerta Jaya).

f. Kunjungan Ratu Belanda ke Indonesia

Kunjungan Ratu Beatrix ke Indonesia dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 1995 selama 10 hari bertepatan dengan tahun diperingatinya Kemerdekaan Indonesia ke-50. Selama kunjungan di Indonesia, Ratu Beatrix berkesempatan untuk mengunjungi Propinsi Sumatera Selatan dan meninjau perkebunan kelapa sawit Betung milik PT. Perkebunan X dan Balai Penelitian Sembawa pada tanggal 29 Agustus 1995.

g. Kunjungan Menteri Pertanian RI ke Belanda

Kunjungan dilaksanakan pada tanggal 21 s/d 24 November 1995, untuk memenuhi undangan resmi Pemerintah Belanda yaitu Menteri Pertanian, Perikanan dan Pengelolaan Lingkungan Belanda (Mr. J.J. van Aartsen). Selain melakukan diskusi serta kunjungan lapangan juga telah dilaksanakan penandatanganan kesepakatan kerjasama bidang penelitian BIOBREES antara Badan LITBANG Pertanian dengan CPRO-DLO yang dilaksanakan oleh kedua menteri.



h. Sidang ke-15 Komisi Bersama Indonesia-Belanda

Sidang ke-15 Komisi Bersama Indonesia-Belanda dilaksanakan pada tanggal 18 s/d 19 Maret 1996 di Den Haag, Belanda. Pada sidang kali ini didahului dengan bidang-bidang Working Group, tetapi mengingat ketidaksiapan dari pihak Indonesia khususnya bidang pertanian, Working Group on Agriculture tidak dapat dilaksanakan.

Delegasi Departemen Pertanian kali ini diwakili oleh Atase Pertanian RI untuk Perwakilan Tetap Republik Indonesia di Brussel. Dalam sidang tersebut disepakati untuk tetap meningkatkan kerjasama dalam wadah "Working Group".

i. Holland Agro 1996

Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 11 s/d 12 Juni 1996. Pameran Holland Agro 1996 telah dibuka resmi oleh Menteri Pertanian RI dan acara Seminar dibuka oleh Duta Besar Belanda yang didampingi oleh Ir. Ancel van Royen (Director of International Trade, Ministry of Agriculture, Fisheries and Nature Management) pada tanggal 11 Juni 1996 di Hotel Shangri-La, Jakarta.

Selain acara pameran, berlangsung juga seminar sehari dengan thema "Dairy Farming and Milk Processing Industry" yang dihadiri oleh sekitar 60 orang peserta.

Menjelang pelaksanaan Holland Agro 1996, Ketua Delegasi Belanda, Ir. Ancel van Royen (Director of International Trade) yang didampingi oleh Mr. Will Huisman (Staf Directorate International Trade) serta Mr. Walter Steemers (Atase Pertanian Belanda di Jakarta) telah mengadakan kunjungan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian dan Staf Ahli Menteri Pertanian pada tanggal 10 Juni 1996.



j. Kunjungan Delegasi Kedutaan Besar Belanda ke Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara

Dalam rangka meningkatkan kerjasama ekonomi Indonesia-Belanda pada tanggal 17 s/d 21 Maret 1997, Delegasi Kedutaan Besar Belanda telah mengadakan kunjungan ke Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara untuk mengumpulkan informasi mengenai pembangunan ekonomi serta mengidentifikasi peluang dagang dan investasi di Indonesia bagian Timur. Dalam kunjungan tersebut, Delegasi Kedutaan Besar Belanda mengadakan kunjungan kehormatan kepada Gubernur Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara.

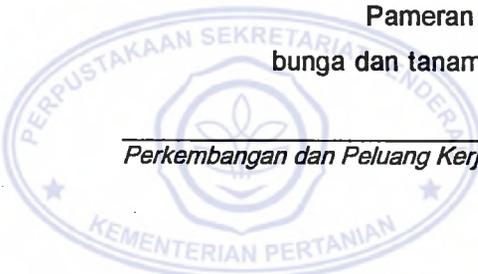
k. Flora Show 1997

Kegiatan pameran yang dilaksanakan pada tanggal 7 s/d 11 Maret 1997, atas kerjasama Yayasan Bunga Nusantara dan Kedutaan Besar Belanda telah dibuka resmi oleh Duta Besar Belanda yang didampingi oleh Ketua Yayasan Bunga Nusantara pada tanggal 7 Maret 1997 di Jakarta Convention Centre, Jakarta. Delegasi Belanda terdiri dari 20 orang pengusaha yang terdiri dari para pengusaha industri bunga dan lembaga-lembaga penelitian. Selain acara pameran berlangsung juga dilaksanakan seminar sehari dengan tema "Dutch Floritech Seminar" yang dihadiri oleh sekitar 80 orang peserta.

l. Pameran Westfrieze Flora 1998 di Bovenkarspel, Belanda

Pameran bunga internasional "Westfrieze Flora" diselenggarakan setiap tahun pada permulaan musim semi di Bovenkarspel, Provinsi Noord-Holland, oleh Yayasan Westfrieze. Tahun ini adalah pameran yang ke-65 dan Indonesia terpilih sebagai tema pameran (tema tahun 1997 adalah Cina).

Pameran diadakan di kompleks gedung pelelangan bunga dan tanaman, seluas 6.000 m² yang telah diubah menjadi



taman dengan suasana Indonesia. Selain itu disediakan pula pasar konsumen, tanaman maupun pameran mesin dan peralatan pertanian. Pameran bunga tersebut merupakan salah satu "international event" Belanda dan rata-rata setiap tahun dihadiri oleh 100.000 pengunjung.

KBRI Den Haag bekerjasama dengan Departemen Pertanian, Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan instansi terkait serta Asosiasi Bunga Indonesia (ASBINDO) membantu sepenuhnya penyelenggaraan pameran, sehingga dapat memanfaatkan pameran, sebagai salah satu usaha meningkatkan hubungan bilateral Indonesia dan Belanda. Pihak ASBINDO telah mengirimkan sebanyak 36 peserta, termasuk tim kesenian dan kebudayaan.

Pembukaan resmi pameran pada tanggal 13 Februari 1998 dilakukan oleh Bapak J.B. Soedarmanto, Duta Besar RI di Den Haag sebagai wakil Pemerintah Indonesia, dan dihadiri oleh Wakil Gubernur Provinsi Noord-Holland, Walikota Stede Broec, pejabat-pejabat pemerintah setempat, serta Ibu D. Bustanil Arifin, Ketua ASBINDO dan pejabat KBRI Den Haag lainnya.

Dalam sambutan pembukaan, Duta Besar RI menyampaikan rasa terima kasih atas pilihan Indonesia sebagai tema pameran, serta penghargaan tinggi dengan diteruskannya penyelenggaraan pameran, meskipun dewasa ini Indonesia sedang menghadapi krisis moneter dan kegoncangan ekonomi. Diharapkan pameran dapat merangsang dan mendorong sektor swasta Belanda khususnya di Propinsi Belanda Utara untuk lebih meningkatkan hubungan baik yang terjalin antar kedua negara.

Selama acara pembukaan, dilakukan upacara penghargaan berupa pemberian nama Mrs. D. Arifin pada sekuntum bunga Lily varietas baru. Penghargaan tersebut diberikan mengingat peran beliau dalam kemajuan flori kultura di Indonesia.



Selain bunga, tanaman dan buah-buahan dari Indonesia, dipamerkan pula produk pertanian Indonesia lainnya, obyek wisata maupun pertunjukkan kesenian khas Indonesia.

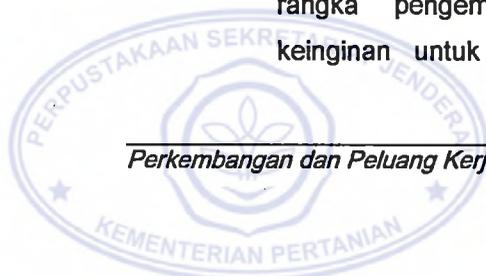
m. Sidang ke-XVI Komisi Bersama Indonesia-Belanda

Sidang ke-XVI Komisi Bersama Indonesia-Belanda dilaksanakan pada tanggal 2-3 November 1998 di Jakarta, Indonesia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Direktur Jenderal HELN, Departemen Luar negeri, sedangkan Delegasi Belanda dipimpin oleh Mr. F.A. Engering, Director General for Foreign Economic Relations, Ministry of Economic Affairs.

Dalam sidang tersebut pihak Belanda menginginkan informasi yang lebih detail dari pihak Indonesia mengenai situasi politik, ekonomi serta kebijaksanaan-kebijaksanaan baru Pemerintah Indonesia dalam Kabinet Reformasi. Hal tersebut diperlukan sebagai pegangan pihak Belanda untuk persiapan program-program "Joint Business Projects" yang diharapkan dapat diimplementasikan awal 1999. Ketua Delegasi Belanda menyampaikan bahwa bantuan luar negeri Belanda tetap memprioritaskan negara-negara Asia sebagai urutan pertama.

Dalam pembahasan mengenai kerjasama teknik dan ekonomi, khususnya sektor pertanian, pihak Indonesia menyampaikan keinginannya untuk melanjutkan kerjasama bukan saja dibidang hortikultura, tetapi juga dibidang-bidang produk-produk susu, peternakan dan perikanan. Lebih lanjut disampaikan pula bahwa MOU mengenai proyek-proyek yang sedang berlangsung dibidang pembudidayaan dan pembenihan akan berakhir tahun 1999.

Pihak Indonesia juga berharap agar Pemerintah Belanda dapat memberikan beasiswa/pelatihan dibidang pertanian dalam rangka pengembangan sumberdaya manusia. Mengenai keinginan untuk melanjutkan kerjasama dibidang riset dan



teknologi, pihak Belanda mengharapkan agar Indonesia dapat menentukan fokus utama bagi kerjasama tersebut. Kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan kerjasama dibidang pertanian yang sempat terhambat sejak tahun 1992. Lebih lanjut, kedua belah pihak juga sepakat untuk mendorong dan mendukung sektor swasta dari kedua negara untuk merealisasikan kerjasama dibidang pertanian.

Untuk topik teknologi dan penelitian, pihak Belanda memberikan indikasi bahwa pemerintahnya telah menyediakan dana bagi pelaksanaan kerjasama dibidang teknologi dan penelitian, dan untuk itu telah disepakati bahwa identifikasi proyek dibidang ini sangat diperlukan, khususnya yang menyangkut masalah teknologi pertanian dan kebijakan teknologi yang menyeluruh.

Dalam rangka Program Tripartite KTNB Indonesia, kedua belah pihak sepakat untuk meneruskan pembahasan masalah ini, khususnya mengenai kesediaan Pemerintah Belanda untuk dapat memberikan bantuan dukungan dana guna pembiayaan program KTNB di bidang kursus, pelatihan, kesejahteraan sosial, kesehatan dan pertanian.

n. **Perpanjangan Kerjasama Penelitian dan Pengembangan antara Departemen Pertanian Indonesia dan Kementerian Pertanian, Pengelolaan dan Perikanan Belanda (BIOBREES)**

Pada tanggal 29 Oktober 1999 telah ditandatangani perpanjangan kerjasama antara Badan LITBANG Pertanian dengan Department of Science and Knowledge Dissemination (DWK) Belanda untuk bidang "Joint Research Cooperative Programme on Biotechnology, Plant Breeding and seed Technology for Horticulture (BIOBREES II)". Kerjasama yang telah dilaksanakan mulai November 1995 dan berakhir November 1999 disepakati untuk diperpanjang selama 4 (empat) tahun.



Dalam kunjungan ke Indonesia, Delegasi Belanda telah berkunjung ke beberapa proyek bantuan antara lain :

1. Paprika di Lembang

Proyek Improving the Horticultural Chains of Indonesia dilaksanakan oleh PT. JORO bekerjasama dengan DLV Agriconsult (Bld). Proyek ini berlokasi di Lembang, Jawa Barat dan Nongkojajar, Jawa Timur. Proyek ini mengintroduksi teknologi rumah kaca dan budidaya paprika dengan teknologi maju. Komponen pemberdayaan petani dilakukan melalui pelatihan agribisnis paprika selama satu musim tanam. Pemasaran hasil dilakukan oleh PT. JORO dengan sasaran pasar dalam negeri maupun ekspor.

Proyek di Lembang berjalan lancar dan mendapat apresiasi tinggi dari Delegasi Belanda. Menteri Pertanian menyarankan agar proyek semacam ini dapat direplikasi di lokasi-lokasi lain di Indonesia.

2. Perikanan di Pasuruan

Proyek New Fish Product for Retail Market dilaksanakan oleh PT. Sekar Bumi bekerjasama dengan Mazara BV (Bld). Proyek berlokasi di Pasuruan, Jawa Timur. Proyek memperbaiki cara penanganan ikan di daerah penangkapan Jawa Timur (Bali, Sulawesi Tengah) dan cara penanganan pasca panen di unit pengolahan PT. Sekar Bumi agar kualitasnya dapat memenuhi permintaan konsumen di Belanda.

3. Industri Jamu di Pasuruan

Proyek Improvement of *Volvariella volvaceae* (mushroom) Production akan dilaksanakan oleh PT. Randhoetatah Cemerlang bekerjasama dengan Christianes



BV (Bld) proyek berlokasi di Pasuruan. Tujuan proyek adalah memperbaiki teknologi memproduksi jamur untuk pasar lokal dan ekspor. Proyek ini tidak melibatkan petani kecil. PT. Randhoetatah merupakan satu dari delapan perusahaan jamur besar di Indonesia dan bersifat tertutup dalam operasinya.

4. Perunggasan di Jawa Barat

Proyek Upgrading the Indonesian Poultry Chains akan dilaksanakan oleh PT. Ayam Manggis (Agro Manunggal Group) bekerjasama dengan DLV Agriconsult dan Utreco (Bld) proyek berlokasi di Jawa Barat. Proyek bermaksud untuk membantu membangkitkan kembali industri perunggasan yang terpuruk akibat hantaman krisis ekonomi. Proyek akan membantu pengadaan peralatan, melakukan pelatihan serta integrasi perusahaan inti dengan contract farmers.

5. Agribisnis Kentang di Brastagi

Proyek Seed Potato Production and Marketing in North Sumatera akan dilaksanakan oleh PT. Selektani bekerjasama dengan Agrico (Bld) lokasi proyek di Kabupaten Tanah Karo. Produksi kentang dilakukan dalam bentuk PIR dengan melibatkan petani kentang Tanah Karo. PT. Selektani menyediakan bibit unggul dan pemasaran hasil untuk di ekspor ke Singapura. Dalam kegiatan ini dilibatkan LSM yang akan bertugas mengorganisasikan petani peserta.



o. Kunjungan Kerja Menteri Pertanian tanggal 31 Oktober - 1 Nopember 2001 ke Belanda

Kunjungan kerja Menteri Pertanian dan rombongan yang dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober-1 Nopember 2001 antara lain yang dibicarakan adalah :

Kerjasama yang akan datang

1. Kemungkinan diaktifkan kembali WGA (Working Group on Agriculture)
 - a. Untuk lebih memperkuat kerjasama bidang pertanian, perlu diwadahi dengan forum pertemuan antara kedua negara yang dapat dimanfaatkan tidak hanya unsur pemerintah tetapi juga unsur swastanya. Forum pertemuan semacam ini pernah dibentuk yaitu WGA Indonesia-Belanda yang melakukan pertemuan terakhir pada tahun 1992 di Jakarta yaitu pada WGA ke-VII.
 - b. Pada sidang Komisi Bersama ke-XVII Indonesia-Belanda 2001 di Den Haag, disepakati agar peng-aktifan WGA dibahas pada saat kunjungan Sekjen Pertanian Belanda ke Indonesia. Namun kunjungan tersebut belum terlaksana. Hal lain yang juga disepakati adalah memisahkan antara "Working Group" bidang pertanian dan kehutanan.
2. Usulan Proyek dalam rangka PBSI
 - a. Pemerintah Belanda melalui Kedutaan Besar Belanda di Jakarta yang disampaikan melalui Atase pertaniannya, memberikan informasi kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian RI mengenai kerjasama bilateral melalui proyek untuk dibiayai oleh Pemerintah Belanda dibawah PBSI (Program Bilateral Samenworking



Indonesia). Menindaklanjuti hal ini Departemen Pertanian (Juni 2001) mengajukan sejumlah 27 proposal/usulan proyek diberbagai sub-sektor.

- b. Setelah dilakukan kajian terhadap usulan -usulan tersebut (dibicarakan di Dep Pertanian dengan Atani Belanda) disepakati 2 (dua) usulan prioritas yaitu :
 - i. Strengthening Indonesia's capacity to effectively responds to opportunities of global economic trends.
 - ii. Development and Socialisation of the Plant Variety Protection Regulation in Indonesia.

3. Usulan Prioritas Kerjasama Mendatang

- a. Encouragement of the role of Private Sector
- b. Empowerment of Capacity Building of Agricultural Institutions
- c. Development of Rural Financial Institutions
- d. Improvement of Agricultural Products Competitiveness
- e. Improvement of Regional Research and Development Institutions
- f. Improvement of Environmental Agricultural Development.

Usulan kerjasama tersebut mencakup aspek-aspek bantuan teknik, pelatihan baik jangka pendek maupun jangka panjang, bantuan peralatan dan fasilitas pendukung lainnya.

- p. Kerjasama antara Swasta Indonesia dengan swasta Belanda dengan bantuan Pemerintah Belanda dalam program PSI (Project Samenworking Indonesia)

Melalui program PSI saat ini sedang dilaksanakan

10 (sepuluh) proyek kerjasama yaitu :



Tabel 2. Proyek PSI di Indonesia

NO	Nama Proyek	Pihak Indonesia	Pihak Belanda
1.	Vanilla Curing	IPB & PT Djasulawangi	Quest International
2.	Biopep	Balai Penelitian Sayuran	CPRO&ENZA Zaden & PT. Ewindo
3.	Palmpus	PT. Easter Sumatra	ATO-DLO & Zebra Elektrotech BV
4.	Biotic	PT. Saung Nirwan	CPRD-DLO&Deliflor & Agriom BV
5.	Agri Selekt	PT. Selektani	Agriom BV
6.	Indorosa	PT. Saung Nirwan & Balai Penelitian Tanaman Hias	PRO-DLO&Terra Nigra
7.	Earlytom	Balai Penelitian Sayuran	Enza Zaden&CPRO-PT. Ewindo DLO
8.	Tropshallot	Balai Penelitian Sayuran & PT. Ewindo	ENZA ZADEN
9.	Indoseed	PT. Ewindo & IPB	PRI & ENZA ZADEN
10	Kapok	JADE BV	PT.Sumber Arto Satu



IV. PELUANG KERJASAMA

Kegiatan perekonomian Belanda mengalami perbaikan yang berarti sejak tahun 1993, terutama disebabkan meningkatnya nilai ekspor yang sejalan dengan terjadinya peningkatan secara nyata perdagangan dunia. Perbaikan ekonomi tersebut tidak terlepas dari dukungan penguasaan teknologi modern, termasuk dalam bidang pertanian.

4.1. Kerjasama Teknis

Belanda merupakan negara pertanian yang menguasai dan menerapkan teknologi modern. Pengolahan tanah dilakukan secara intensif serta menggunakan peralatan dan metode modern, menghasilkan berbagai jenis benih tanaman untuk ekspor, budidaya rumah kaca yang luas serta aktivitas agribisnis ternak secara permanen.

Working Group on Agriculture (WGA) yang telah dibentuk oleh Komisi Bersama Indonesia-Belanda tahun 1982 diharapkan menjadi wadah yang efektif dalam peningkatan kerjasama mendatang untuk :
a) mengembangkan terjalinnya kerjasama antar instansi pemerintah dan swasta kedua negara, dan b) meningkatkan investasi swasta kedua belah pihak.

Sidang WGA on Agriculture yang sempat terhenti sejak tahun 1996, diharapkan dapat diaktifkan kembali dengan dimulainya kembali Sidang ke-17 Komisi Bersama RI-Belanda di Denhaag pada 27-28 Pebruari 2001. Pada saat mendatang, WGA ini diharapkan dapat memacu terjadinya alih teknologi, joint research, exchange visit and information dan adanya joint promotion untuk pemasaran produk pertanian.

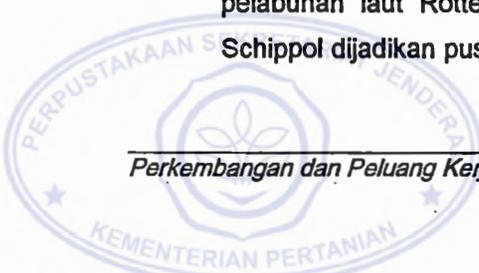


4.2. Kerjasama Perdagangan dan Investasi

Walaupun masih terdapat berbagai hambatan, namun terdapat beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan Indonesia dalam meningkatkan ekspor non-migas di pasaran Eropa/Belanda seperti :

1. Belanda merupakan Pintu Masuk (Gate way) terbesar produk Indonesia ke Eropa. Berdasarkan data statistik Belanda bahwa hampir 40-50% produk Indonesia yang diekspor ke Eropa melalui Belanda, hal ini merupakan peluang yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya.
2. Belanda adalah negara pedagang, dimana jaringan pedagang Belanda sudah teratur rapi sejak beberapa tahun yang lalu.
3. Sarana dan prasarana ekonomi (transportasi, komunikasi, gudang, dan lain-lain) Belanda paling efektif dan efisien sehingga sangat mendukung kegiatan usaha. Pembiayaan swastanya kuat sehingga walaupun diputuskan hubungan kerjasama pembangunan oleh Indonesia tidak berpengaruh sama sekali pada hubungan dagang kedua negara.
4. Pertumbuhan ekonomi dan perdagangan Belanda yang terus meningkat setiap tahun antara lain ditunjukkan gross domestic product yang meningkat 1,85% per tahun dan atau perdagangan Belanda - Dunia meningkat 6,87% per tahun, sehingga perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi ekspor kita di pasaran Belanda.
5. Ramalan pertumbuhan ekonomi Belanda 2 tahun mendatang yang semakin membaik, hal ini merupakan peluang yang baik bagi ekspor Indonesia di pasar Belanda.

Belanda berusaha memanfaatkan dengan sebaik-baiknya pasar tunggal Eropa (PTE) dengan cara meningkatkan keunggulan komparatif yang selama ini dimiliki melalui konsep "Netherlands a Gateway to Europe". Konsep ini prinsipnya mengharapkan agar pelabuhan laut Rotterdam dan Amsterdam serta pelabuhan udara Schiphol dijadikan pusat lalu lintas barang keluar dan masuk ke pasar



Masyarakat Eropa. Disamping itu, Belanda juga sedang mengembangkan konsep "Amsterdam as an International Financial Center" yang juga melengkapi sarana pintu gerbang Eropa.

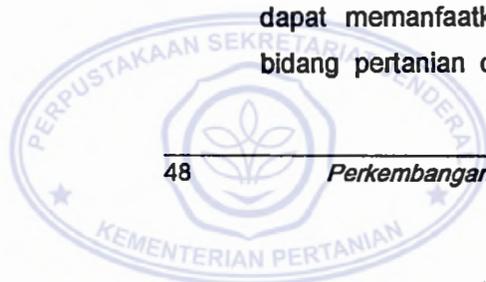
Sasaran utama Belanda untuk mempromosikan kedua konsep tersebut di atas ialah negara-negara di Asia Pasifik, Amerika Latin, dan Afrika. Beberapa negara di Asia seperti Jepang, Taiwan, Thailand, Korea Selatan dan Malaysia telah mengambil langkah-langkah untuk menjadikan Belanda sebagai "Distribution Center", sedangkan Indonesia sampai saat ini sedang mempertimbangkan tawaran untuk memanfaatkan Rotterdam sebagai pusat distribusi ekspor Indonesia di pasaran ME.

Dipihak lain Indonesia dapat memanfaatkan keanggotaan Belanda di Uni Eropa, tidak saja sebagai gerbang pemasaran produk Indonesia di seluruh negara Uni Eropa, tapi juga untuk membantu Indonesia mengatasi hambatan-hambatan teknis maupun non-teknis atas ekspor produk Indonesia yang disebabkan regulasi Uni Eropa. Selain itu Belanda diharapkan dapat memberikan bantuan teknis dan keuangan kepada UKM Indonesia dalam kerangka pemanfaatan program Asia-Invest.

Investasi Belanda yang merosot tajam sejak tahun 1998 (US\$ 411,8 juta), belum menampakkan perkembangan yang berarti dalam investasi baru. Kalaupun ada, hanya merupakan investasi portofolio atau investasi yang ditunjukkan untuk menambah/ memperkuat equity dari investasi yang sudah ada.

Guna mendorong masuknya investasi yang lebih besar, Indonesia perlu meningkatkan kepastian hukum dan stabilitas keamanan dan sosial/politik dalam negeri. Selain itu, perlu diupayakan kunjungan pejabat dan pengusaha kedua negara dalam bidang pertanian untuk masa mendatang.

Dalam membangun kerjasama bilateral, Indonesia diupayakan dapat memanfaatkan peluang kerjasama untuk menarik investasi bidang pertanian dari negara partner. Investasi asing di Indonesia



dijamin dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 dan investasi sektor pertanian diatur dengan Keputusan Presiden No. 118 Tahun 2000.

Investasi asing sektor pertanian dan industri makanan yang telah disetujui Pemerintah Indonesia secara umum mengalami peningkatan dan berfluktuasi dari tahun 1996 s/d 2000. Besarnya perkembangan investasi yang telah disetujui BKPM dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Perkembangan Investasi Sektor Pertanian dan Industri Makanan Tahun 1996-2000 Yang Telah Disetujui BKPM.

(US\$ Million)

Tahun	Sektor Pertanian				Industri Makanan
	Tanaman Pangan	Peternakan	Perkebunan	Perikanan	
1996	52,2	86,0	1.168,1	79,8	691,4
1997	234,4	1,8	200,4	27,1	572,8
1998	224,4	15,4	725,4	33,0	342,0
1999	80,6	48,3	283,8	69,7	680,9
2000	311,3	18,4	59,1	49,5	701,0

Kerjasama bilateral bidang pertanian pada masa mendatang diharapkan dapat memanfaatkan peluang investasi asing di Indonesia, baik untuk tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan. Adapun jenis komoditas, bidang investasi dan lokasi yang dapat dipromosikan secara bilateral dalam menarik investasi asing tersebut dapat dilihat pada Tabel Lampiran 2.



Tabel Lampiran 1. PROFILE NEGARA KERAJAAN BELANDA

1.	Nama resmi	:	Kerajaan Belanda (Het Koninkrijk der Nederlanden)
2.	Bentuk negara	:	Monarki Konstitusional
3.	Kepala negara	:	Sejak 30 April 1980, Ratu Beatrix Wilhelmina Armgard (lahir tgl. 31 Januari 1938) dinobatkan menjadi Kepala Negara)
4.	Kepala pemerintahan	:	Perdana Menteri Wim Kok dari Partai PVDA menduduki jabatan PM untuk kedua kalinya setelah memperoleh kemenangan dalam Pemilu 6 Mei 1998
5.	Ibu kota	:	Amsterdam
6.	Pusat pemerintahan	:	Den Haag
7.	Kedudukan geografis	:	Kerajaan Belanda terletak di Eropa barat, muara dari tiga sungai terbesar di Eropa, yaitu Sungai Rhine, Meuse dan Schelde
8.	Perbatasan	:	Sebelah Timur Republik Jerman, sebelah Selatan Kerajaan Belgia, sebelah Barat dan Utara Laut Utara
9.	Luas wilayah	:	41.160 km ²
10.	Iklim	:	Beriklim sedang temperatur tertinggi 23.6° Celcius dan terendah 6° Celcius
11.	Penduduk	:	15.9 juta jiwa
12.	Hari nasional	:	30 April
13.	Agama	:	Katolik 36%, Protestan 27%, dan sisanya penganut kepercayaan lain
14.	Bahasa	:	Bahasa Belanda (Nederlands-taal)
15.	Ekonomi	:	<ul style="list-style-type: none"> - Sumberdaya alam : gas alam, minyak, listrik, kimia - Mata uang : Nfl (Nederlands Florin/Golden) - Inflasi tahun 1999 : 2% - Pendapatan perkapita : Nfl. 49.000



Tabel Lampiran 2. Peluang Investasi Sektor Pertanian di Indonesia

Commodities	Fields of investment	Provinces
Food Crop		
1. Paddy/rice	<ul style="list-style-type: none"> - Production input - Seeding - Agric. Machinery service - Marketing - Rice Milling Unit - Processing (rice powder) 	West Java, Central Java, East Java, South Sulawesi, Lampung, North Sumatera, West Sumatera, South Sumatera, South Kalimantan, Bali, West Nusa Tenggara Barat.
2. Cassava	<ul style="list-style-type: none"> - Marketing - Processing (tapiokca, <i>pellet glucosa</i>, starch, sorbitol, spiritus, dextrin) 	Lampung, North Sumatera, South Sumatera, West Java, Central Java, Yogyakarta, East Java, South Sulawesi, East Nusa Tenggara
3. Corn	<ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Marketing - Processing (maize, cooking oil, maizena, ethanol, maize powder, feed, <i>organic acid</i>) 	West Java, Central Java, East Java, South Sulawesi, Lampung, North Sumatera, East Nusa Tenggara, North Sulawesi
4. Soybean	<ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Marketing - Processing (tempe, sauce, ketchup, powder, feed, cooking oil, nata de soy) 	West Java, Central Java, Yogyakarta, East Java, south Sulawesi, Lampung, West Nusa Tenggara
5. Groundnut	<ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Cultivation - Processing - Marketing 	North Sumatera, South Sumatera, West Java, Central Java, Yogyakarta, East Java, West Nusa Tenggara, South Kalimantan, South Sulawesi
6. Mungbean	<ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Cultivation - Processing - Marketing 	North Sumatera, South Sumatera, Lampung, West Java, Central Java, East Java, West Nusa Tenggara, East Nusa Tenggara, North Sulawesi, South Sulawesi



7. Sweet potato	<ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Cultivation - Processing - Marketing 	North Sumatera, West Sumatrera, Riau, Jambi, South Sumatera, Bengkulu, Lampung, West Java, Central Java, East Java, Bali, East Nusa Tenggara, South Kalimantan, South East Sulawesi, South Sulawesi, Irian Jaya
-----------------	--	---

Commodities	Fields of investment	Provinces
Horticulture		
1. Manggo	<ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Cultivation - Processing (<i>canned juice, dried fruit, jam, jelly, pickle</i>) - Marketing 	West Java, Central Java, East Java, South Sulawesi, Bali, NTB, NTT, South Sumatera, North Sumatera, Lampung, Yogyakarta
2. Durian	<ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Cultivation - Marketing 	North Sumatera, West Sumatrera, Riau, South Sumatera, Lampung, Bengkulu, West Java, Central Java, East Java, West Kalimantan, Central Kalimantan, East Kalimantan
3. Rambutan (hairy fruit)	<ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Cultivation - Processing (<i>syrup, dried fruit, canned</i>) - Marketing 	West Java, Central Java, East Java, North Sumatera, West Sumatera, Riau, Jambi, South Sumatera, Lampung, Yogyakarta, Bali, South Kalimantan, Central Sulawesi
4. Mangosteen	<ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Cultivation - Processing (<i>canned</i>) - Marketing 	North Sumatera, West Java, Bali, South Sulawesi, West Sumatera, Riau, Central Java, East Java
5. Salacca (snake fruit)	<ul style="list-style-type: none"> - Cultivation - Processing (<i>syrup, dried fruit, canned</i>) - Marketing 	Central Java, Yogyakarta, East Java, North Sumatera, North Sulawesi, South Sulawesi, Bali, NTB, West Java, Irian Jaya
6. Orange	<ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Cultivation - Processing - Marketing 	North Sumatera, West Sumatera, Jambi, West Java, East Java, Bali, NTB, NTT, West Kalimantan



7. Banana	<ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Processing (<i>Powder, chips, puree, jam, wine, syrup, nector, juice, jelly</i>) - Marketing 	North Sumatera, West Sumatera, South Sumatera, Lampung, West Java, Central Java, East Java, NTB, NTT, Bali, South Sulawesi, Central Sulawesi, South-East Sulawesi, West Kalimantan
8. Potato	<ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Cultivation - Processing (<i>chips, powder</i>) - Marketing 	North Sumatera, West Sumatera, Jambi, South Sumatera, West Java, Central Java, East Java, South Sulawesi
9. Cabbage	<ul style="list-style-type: none"> - Cultivation - Marketing - Processing 	North Sumatera, West Sumatera, Bengkulu, West Java, Central Java, East Java, Jambi, South Sumatera, Lampung, Bali, South Sulawesi, North Sulawesi
10. Chilli	<ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Cultivation - Processing (<i>sauce, paste, powder, chilli oil, dried chilli</i>), 	North Sumatera, Riau, West Sumatera, Bengkulu, South Sumatera, Lampung, West Java, Central Java, East Java, Yogyakarta, South Sulawesi, North Sulawesi, NTB, Bali
11. Shallot	<ul style="list-style-type: none"> - Processing - Marketing 	North Sumatera, West Java, Central Java, Yogyakarta, East Java, South Sulawesi, NTB, West Sumatera, Lampung
12. Carrot	<ul style="list-style-type: none"> - Cultivation - Processing - Marketing 	North Sumatera, West Sumatera, Bengkulu, South Sumatera, West Java, Central Java, East Java, NTB, Bali, South Sulawesi
13. Tomato	<ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Processing - Marketing 	North Sumatera, West Sumatera, Bengkulu, South Sumatera, West Java, Central Java, East Java, NTB, Bali, South Sulawesi
14. Orchid and other ornamental plant	<ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Cultivation - Processing (<i>oriental plant : parfume</i>) - Marketing 	North Sumatera, Bengkulu, Jambi, West Java, West Kalimantan, East Kalimantan, Irian Jaya, Riau, North Sulawesi, Bali, Yogyakarta, Jakarta



15. Medicine plant	<ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Cultivation - Processing (traditional medicine/jamu) - Marketing 	North Sumatera, West Sumatera, Riau, Jambi, Lampung, Jakarta, West Java, Central Java, Yogyakarta, East Java, Bali, West Kalimantan, East Kalimantan, North Sulawesi, South Sulawesi
--------------------	--	--

Commodities	Fields of investment	Provinces
Livestock		
1. Cattle	<ul style="list-style-type: none"> - Breeding - Fattening - Processing (<i>corned beef</i>, sausage, leather industry) - Marketing 	West Sumatera, Lampung, South Sumatera, Sulawesi, NTB, NTT
2. Dairy cow	<ul style="list-style-type: none"> - Breeding - Fattening - Processing (milk, milk sweet, cheese, <i>yoghut</i>) - Marketing 	West Java, Central Java, East Java, Lampung
3. Poultry	<ul style="list-style-type: none"> - Breeding - Cultivation - Processing (<i>corned</i>, sausage) - Marketing 	Java, Lampung, South Sulawesi, East Kalimantan
4. Goat	<ul style="list-style-type: none"> - Breeding - Fattening - Processing (milk, leather, sausage) - Marketing 	Sumatera, Java, West Kalimantan
5. Pig	<ul style="list-style-type: none"> - Breeding - Fattening - Processing (sausage) - Marketing 	West Kalimantan, Riau, Islands, North Sumatera, Iarain Jaya



Commodities	Fields of investment	Provinces
Estate		
1. Rubber	<ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Processing (latex, dried rubber, <i>crumb rubber, slab</i>) - Marketing 	North Sumatera, West Sumatera, Riau, Jambi, South Sumatera, Bengkulu, Lampung, South Kalimantan, East Kalimantan, Central Sulawesi
2. Palm oil	<ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Processing (CPO, <i>palm karnel, sludge</i>) - Marketing 	North Sumatera, West Sumatera, Riau, Jambi, South Sumatera, Bengkulu, Lampung, West Kalimantan, Central Kalimantan, East Kalimantan, Central Sulawesi, South Sulawesi, Irian Jaya
3. Coffe	<ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Processing (powder, <i>cofee green, instan coffe</i>) - Marketing 	North Sumatera, West Sumatera, Bengkulu, South Sumatera, Lampung, West Java, Central Java, East Java, Bali, NTB, NTT, West Kalimantan, South Kalimantan, East Kalimantan, North Sulawesi, Central Sulawesi, South Sulawesi, South-east Sulawesi, Irian Jaya
4. Cacao	<ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Processing (<i>cocoa, powder, cocoa cake, fat, shall, pilp</i>) - Marketing 	North Sumatera, West Sumatera, Lampung, Bali, NTT, Bengkulu, West Java, Central Java, Yogyakarta, West Kalimantan, East Kalimantan, Central Sulawesi, South Sulawesi, South-east Sulawesi, Irian Jaya
5. Cashew nut	<ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Processing (fried <i>cashew nut, shell liquid, sweet</i>) - Marketing 	Central Java, Yogyakarta, East Java, Bali, NTB, NTT, North Sulawesi, Central Sulawesi, South Sulawesi, South-east Sulawesi, Irian Jaya



BAGIAN PROYEK PENINGKATAN KERJASAMA LUAR NEGERI
BIRO KERJASAMA LUAR NEGERI
DEPARTEMEN PERTANIAN
2001

